



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI

JL.RM. Nur Atmadibrata No.08 Telanai Pura Jambi


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga dapat diselesaikan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2026 dipergunakan sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja dalam kurun waktu satu tahun. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahunan 2026 disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaian indikator kinerja dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2026 dapat dijadikan sebagai Rencana Kerja Anggaran yang akan dilaksanakan sebagai kegiatan yang akan diimplementasikan untuk tercapainya tujuan target Indikator Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi merupakan dedikasi Kinerja terutama semua aparatur kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.

Sangat di harapkan bahwa Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2026 dapat mendukung Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sesuai dengan amanat pasal 78 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Selanjutnya Rencana Kerja ini masih perlu masukan dan saran dari semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2026.

Jambi, Januari 2025

KEPALA DINAS, *dk*

dr. M.H.D. Fery Kusnadi, Sp. OG.
NIP. 197505252002121002

DAFTAR ISI

Halaman	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayan Perangkat Daerah	46
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	81
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	83
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	121
BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	123
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	125
3.3. Program dan Kegiatan	128
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	165
BAB V PENUTUP	186

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) sebagai Rencana Kerja Tahunan.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dalam pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah, yang diorganisir oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Sebagai tindaklanjutnya Kepala Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD dan diwajibkan juga menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dan juga mengacu pada hasil Musyawarah Pembangunan Daerah.

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan Tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Di dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan juga memuat permasalahan yang belum dapat terselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dan Rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai Rencana Kerja Tahunan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2026 meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah yaitu:

- a. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- b. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tatacara Perencana, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- i. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
- k. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas keputusan Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodenfikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029
- m. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Thun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029
- o. Peraturan Gubernur Nomor 36 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi;
- p. Surat Edaran

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2026 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 dan menjabarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan dalam jangka pendek 1 (satu) Tahun baik itu Penjabaran tujuan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jambi ke dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan.

b. Tujuan

- a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan di bidang kesehatan dalam jangka waktu satu tahun yaitu tahun 2026.
- b. Sebagai pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang tertuang dalam Laporan Kinerja (LKJ);
- c. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN. PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2024 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja Program dan Kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pada tahun 2024 Dinas Kesehatan Provinsi Jambi telah melaksanakan 5 Program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini didukung alokasi anggaran Rp 52.123.461.364,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 45.844.999.701,- (87,95%). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki 8 Kegiatan yang terdiri atas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Program ini memiliki 8 indikator kinerja pada setiap kegiatan, dengan 8 indikator kinerja yang tercapai sesuai dengan target kinerja (100%), Terdapat 3 indikator kinerja yang memiliki realisasi pencapaian yang melebihi dari target kinerja pada tahun 2024 diantaranya adalah Indikator Predikat AKIP / Nilai AKIP dengan target kinerja dengan nilai 81,91% terealisasi dengan nilai 82,60%, Persentase Dokumen Administrasi memiliki target kinerja dengan nilai indeks sebesar 77 & terealisasi dengan nilai indeks 86,62%, dan Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja sebesar 87,41% terealisasi 86,73%.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program ini yaitu :

- Adanya silpa anggaran dari gaji P3K yang hanya dibayarkan Januari sampai Maret dikarenakan lulus seleksi penerimaan P3K
- Terdapat beberapa PNS yang pensiun.
- Upaya yang dilakukan adalah menghitung kembali kebutuhan gaji pegawai untuk tahun berikutnya.

Manfaat program ini adalah Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan dan kinerja perangkat daerah.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini didukung alokasi anggaran Rp 68.254.430.645 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 63.197.254.787 (92,59%). Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat memiliki 4 Kegiatan yang terdiri atas Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi, dan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi. Program ini memiliki 2 indikator kinerja pada setiap kegiatan, dengan 1 indikator kinerja memiliki realisasi pencapaian yang melebihi dari target kinerja pada tahun 2024 yaitu persentase Kab/Kota menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi dengan target kinerja sebesar 72,73% terealisasi 100%, dan 1 indikator kinerja tercapai yaitu Persentase Layanan Laboratorium Rujukan Spesimen, IPTEK dan SDM Laboratorium Se Provinsi Jambi dengan target kinerja 100% terealisasi 100%.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program ini yaitu

- Masih adanya Kecamatan yang belum memiliki fasilitas pelayanan Tingkat pertama (Puskesmas) yaitu di Kecamatan Air Hangat dan Kecamatan Tanah Cogok.
- Masih ada 5 Kabupaten/Kota (Batanghari, Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi, Tanjab Timur dan Kerinci) dengan rasio Tempat Tidur di bawah 1:1000 Penduduk
- Pengadaan obat tidak dapat terlaksana karena pengesahan DPA refocusing pada pertengahan November sehingga penyedia tidak mampu menyediakan obat sampai batas akhir tahun.
- Cakupan *Universal Health Coverage* (UHC) baru mencapai 93,88%. Yang belum mencapai target UHC sebanyak 4 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Merangin, Tebo, Tanjab Timur, dan Kerinci.
- Masih terdapat 3 Kabupaten yang belum mencapai eliminasi Malaria yaitu Kabupaten Batanghari, Merangin, dan Sarolangun.

Upaya yang dilakukan adalah:

- Mendorong Kabupaten Kerinci untuk pemenuhan fasilitas tersebut.
- Memfasilitasi kabupaten/kota dalam pemenuhan fasilitas pelayanan rujukan melalui penganggaran DAK Fisik.
- Pemenuhan obat dilakukan melalui pemenuhan obat dari Kementerian Kesehatan sehingga *buffer stock* obat tetap tersedia di Provinsi Jambi
- Memfasilitasi kabupaten/kota dalam peningkatan cakupan kepesertaan JKN terutama kepesertaan masyarakat miskin melalui Data Terpadu Kesejahteraan

Sosial (DTKS) yang berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Dukcapil di kabupaten/Kota

- Memperkuat kabupaten/kota dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit Malaria.

Manfaat program ini adalah:

- Pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
- Tersedia obat *buffer stock* di Provinsi Jambi
- Masyarakat memiliki jaminan kesehatan terutama masyarakat miskin

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini didukung alokasi anggaran Rp790.825.445,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 526.179.890,- (66,54%). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan memiliki 2 Kegiatan yang terdiri atas Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi, Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi.

Program ini memiliki 3 indikator kinerja pada setiap kegiatan, dengan 2 indikator kinerja memiliki realisasi pencapaian yang melebihi dari target kinerja pada tahun 2024 yaitu persentase puskesmas lengkap 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar dengan target kinerja 46% terealisasi 68,75%, dan persentase pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan di Fasyankes sesuai standar dengan target kinerja 46% terealisasi 68,75% serta 1 indikator kinerja tidak tercapai yaitu persentase SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi (Bapelkes) dengan target realisasi kinerja 90,7% terealisasi 88,33%.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program ini yaitu :

- Distribusi tenaga yang tidak merata pada setiap Puskesmas, penumpukan tenaga di puskesmas perkotaan.
- Ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas serta distribusi yang tidak merata tidak terlepas dari kewenangan tentang pengangkatan, penempatan, dan mutasi pegawai yang menjadi kewenangan kabupaten/kota masing-masing.
- Belum semua tenaga kesehatan mendapatkan pelatihan terstandar sesuai dengan kompetensi program dan layanan kesehatan.

Upaya yang dilakukan adalah:

- Upaya yang dilakukan masing-masing kabupaten/kota dalam pemenuhan SDM bervariasi; melalui kontrak daerah, kontrak sukarela, dan lain-lain sesuai dengan kebijakan kabupaten/kota masing-masing
- Memfasilitasi kabupaten/kota dalam pemenuhan tenaga kesehatan melalui program Nusantara Sehat dan program dokter intership.

Manfaat program ini adalah:

- Pemenuhan dan pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan.

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman

Program ini didukung alokasi anggaran Rp 198.839.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 177.144.998 (89,09%). Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman memiliki 2 Kegiatan yang terdiri atas Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) dan Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).

Program ini memiliki 3 indikator kinerja pada setiap kegiatan, dengan semua indikator kinerja yang tercapai sesuai dengan target kinerja tahun 2024 diantaranya adalah persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian dan alkes yang berizin dengan target kinerja 100% terealisasi 100%, persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang memenuhi ketentuan perizinan dengan target kinerja 100% terealisasi 100%, persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang memenuhi ketentuan perizinan dengan target kinerja 100% terealisasi 100%.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program ini yaitu:

- Masih terdapat PBF yang melaksanakan penyimpanan obat yang tidak sesuai standar sehingga dapat merusak obat yang akan disalurkan ke masyarakat
- Masih terdapat alat kesehatan yang tidak sesuai standar yang dipasarkan di masyarakat.

Upaya yang dilakukan adalah:

- Melakukan pengawasan dan menindalanjuti terkait dengan Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK.
- Melakukan Pembinaan terkait dengan Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK.
- Merekomendasikan terkait dengan Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK.

Manfaat program ini adalah:

1. Masyarakat terlindungi dari penyalahgunaan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini didukung alokasi anggaran Rp 1.097.839.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 396.244.833 (36,14%). Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan memiliki 2 kegiatan yang terdiri atas Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah

Provinsi, Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi.

Program ini memiliki 3 indikator kinerja pada setiap kegiatan, dengan 2 indikator kinerja memiliki realisasi pencapaian yang melebihi dari target kinerja pada tahun 2024 diantaranya adalah persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dengan target kinerja 72,72% terealisasi 81,81% dan persentase desa/kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)/ODF dengan target kinerja 74% terealisasi 75,39%. Serta 1 indikator tercapai yaitu Jumlah Tema Pesan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) program kesehatan dengan target kinerja sebanyak 10 tema terealisasi 10 tema.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program ini yaitu:

Masih terdapat kabupaten/kota yang belum menerapkan kebijakan GERMAS yaitu Kabupaten Merangin dan Kabupaten Muaro Jambi, hal ini dikarenakan tidak dapat melaksanakan penggerakkan masyarakat sebanyak minimal 3 kali dalam setahun.

Upaya yang dilakukan adalah:

- Mendorong komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan upaya promotif preventif dalam pelaksanaan GERMAS di daerah.
- Mendorong implementasi dan pembudayaan GERMAS oleh lintas sektor dan lintas program di provinsi maupun di kabupaten/kota.

Manfaat program ini adalah:

Melaksanakan penggerakkan masyarakat dalam mendukung GERMAS minimal 3 kali setahun dengan melibatkan lintas sektor; pendidikan (sekolah), Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan atau mitra potensial.

Tabel T-C.29.

Dinas Kesehatan Provinsi Jambi														
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Restra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1					Urusan									
1	01				Bidang Urusan									
1	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Predikat AKIP / Nilai AKIP	80,00	81,72	75,00			78,00	159,72	1,9965
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	100	100,00	25	0,25	100,00	225,00	2,25
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,00	1	4,00	2	0,50	4,00	7,00	1,75

Ranwal Renja Tahun 2026

1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,00	0	1,00	1	1,00	1,00	2,00	2
1	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,00	1	1,00	1	1,00	1,00	3,00	3
1	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1,00	0	1,00	-	1,00	1,00	1,00	1
1	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1,00	1	1,00	1	1,00	1,00	3,00	3
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,00	0	3,00	2	0,67	3,00	5,00	1,666666667

1	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,00	4	9,00	3	0,33	9,00	16,00	1,777777778
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan waktu penyampaian rekonsiliasi laporan keuangan	100,00	100	100,00	25	0,25	100,00	225,00	2,25
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14,00	14	14,00	3	0,21	14,00	31,00	2,214285714
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatalaksanaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	3	12,00	3	0,25	12,00	18,00	1,5
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatalaksanaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (Labkes)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	3	12,00	3	0,25	12,00	18,00	1,5
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatalaksanaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (Bapelkes)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	6	12,00	3	0,25	12,00	21,00	1,75
1	02	01	1.02	05		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,00	0	3,00	3	1,00	3,00	6,00	2
1	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	1,00	0	1,00		-	1,00	1,00	1

Ranwal Renja Tahun 2026

						Pemeriksaan									
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12,00	100	12,00	-	12,00	112,00	9,333333333		
1	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2,00	0	2,00	-	2,00	2,00	1		
1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi BMD	100,00		100,00	25	0,25	100,00	125,00	1,25	
1	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,00		1,00	-	1,00	1,00	1		
1	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2,00		2,00	-	2,00	2,00	1		
1	02	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1,00		1,00	-	1,00	1,00	1		

1	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2,00		2,00	-	2,00	2,00	1	
1	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6,00		6,00	-	6,00	6,00	1	
1	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,00		2,00	-	2,00	2,00	1	
1	02	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1,00		1,00	-	1,00	1,00	1	
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	78,00	87,41	76,00	-	77,00	164,41	2,107820513	
1	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3,00	3	3,00	-	3,00	6,00	2	
1	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1,00		1,00	-	1,00	1,00	1	
1	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1,00		1,00	-	1,00	1,00	1	
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	3,00	3	3,00	1	0,33	3,00	7,00	2,333333333

1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,00	1	1,00	1	1,00	1,00	3,00	3
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Labkes)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,00	1	1,00	1	1,00	1,00	3,00	3
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bapelkes)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,00	1	1,00	1	1,00	1,00	3,00	3
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	1,00		1,00		-	1,00	1,00	1
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1,00		1,00		-	1,00	1,00	1
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Labkes)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1,00		1,00	1	1,00	1,00	2,00	2
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	15,00	4	15,00	7	0,47	15,00	26,00	1,733333333
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Labkes)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	3,00	1	3,00	3	1,00	3,00	7,00	2,333333333
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Bapelkes)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	3,00	3	3,00	3	1,00	3,00	9,00	3

1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan Yang Disediakan	10,00	10	10,00	7	0,70	10,00	27,00	2,7
1	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,00		12,00	3	0,25	12,00	15,00	1,25
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00	7	12,00	3	0,25	12,00	22,00	1,833333333
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Labkes)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00	4	12,00	3	0,25	12,00	19,00	1,583333333
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Bapelkes)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00	6	12,00	3	0,25	12,00	21,00	1,75
1	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1,00		1,00	1	1,00	1,00	2,00	2
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	97,00	98,11	95,00	93,00	0,98	96,00	287,11	2,959929975
1	02	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1,00		2,00		-	2,00	2,00	2
1	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1,00		1,00		-	1,00	1,00	1

1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5,00		5,00	3,00	0,60	5,00	8,00	1,6
1	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1,00		1,00	5	5,00	1,00	6,00	6
1	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5,00	1	5,00	5	1,00	5,00	11,00	2,2
1	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Labkes)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5,00	5	5,00	5	1,00	5,00	15,00	3
1	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Bapelkes)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1,00	1	1,00	1	1,00	1,00	3,00	3
1	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11,00	11	11,00	2	0,18	11,00	24,00	2,181818182
1	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Bapelkes)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1,00	1	1,00	1	1,00	1,00	3,00	3

1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Labkes)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	3	12,00	3	0,25	12,00	18,00	1,5
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Bapelkes)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	3	12,00	3	0,25	12,00	18,00	1,5
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase nilai Barang Milik Daerah (BMD) yang telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (SK PSP) sesuai ketentuan	100,00	100	100,00	25	0,25	100,00	225,00	2,25
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15,00	15	15,00	6	0,40	15,00	36,00	2,4
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Labkes)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2,00	0	2,00	2	1,00	2,00	4,00	2
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Bapelkes)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3,00	1	3,00	3	1,00	3,00	7,00	2,333333333

1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Labkes)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10,00	2	10,00	3	0,30	10,00	15,00	1,5
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3,00		3,00	3	1,00	3,00	6,00	2
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Bapelkes)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00	0	1,00	1	1,00	1,00	2,00	2
1	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3,00	1	3,00	1	0,33	3,00	5,00	1,66666667
1	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Bapelkes)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00	1	1,00	1	1,00	1,00	3,00	3
1	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7,00	2	7,00	7	1,00	7,00	16,00	2,285714286
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Ketersediaan kegiatan operasional Balai Laboratorium Kesehatan	100,00	25	100,00	75	0,75	100,00	200,00	2

1	02	01	1.10	11	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Labkes)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	7,00	7	7,00	7	1,00	7,00	21,00	3
1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat						#DIV/0!		-	#DIV/0!
					Persentase balita stunting	10,00	18	14,00	18	1,29		12,00	48,00	4,8
					Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	92,00	86,29	87,00	87	1,00		89,00	262,29	2,850978261
					Persentase Bumil Kurang Energi Kronis (KEK)		11,6		14,9	#DIV/0!			26,50	#DIV/0!
					Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100,00	100	100,00	25	0,25		100,00	225,00	2,25
					Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100,00	100	100,00	25	0,25		100,00	225,00	2,25

						Persentase Kab/Kota yang mencapai angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC succes rate) minimal 90%	90,91	54,55	72,73	27,27	0,37	81,82	163,63	1,79997
						Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi malaria	10,00	7	9,00	7	0,78	9,00	23,00	2,3
						Persentase Orang dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART)	60,00	48	50,00	50	1,00	55,00	153,00	2,55
						Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi	3,00	1	2,00	2	1,00	2,00	5,00	1,666666667
						Jumlah kepesertaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang ditanggung oleh pemerintah provinsi Jambi (jiwa)	500	76.115	77.086	66.126	0,86	77.586	219.827,00	439,654
						Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terakreditasi	100,00	90,82	100,00	50,00	0,50	100,00	240,82	2,40821256
						Persentase rumah sakit yang terakreditasi	100,00	100,00	100,00		-	100,00	200,00	2

					Persentase Ketersediaan Obat di Instalasi Farmasi di Provinsi (40 Item Obat)	100,00	100	100,00	25	0,25	100,00	225,00	2,25
					Persentase SDM Kesehatan mendapat sertifikasi kompetensi	65,90	53,40	56,80	86,38	1,52	61,35	201,13	3,052048558
					Persentase Akreditasi Laboratorium Kesehatan Provinsi Penuh	100,00		100,00		-	100,00	100,00	1
1	02	02	1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	65	57,79	55	62,8	1,14	60	180,59	2,778307692
					Persentase RS milik pemerintah daerah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	70	81,25	50	82,35	1,65	60	223,60	3,194285714
					Persentase Standar sarana dan prasarana Instalasi farmasi provinsi yg terpenuhi	100	80	100	50	0,50	100	230,00	2,3
					Persentase Pemenuhan SPA (Sarana, Prasarana, dan Alkes) dan SDM	90		80	0	-	85	85,00	0,944444444

						Kesehatan Laboratorium Kesehatan								
1	02	02	1.01	01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	-		1	0	-	-	-	#DIV/0!
1	02	02	1.01	02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	1		1		-	1	1,00	1
1	02	02	1.01	04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Labkes)	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1	1	1		-	1	2,00	2
1	02	02	1.01	06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	4	2	4	2	0,50	4	8,00	2
1	02	02	1.01	07	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Jumlah Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	1	1	1	1	1,00	1	3,00	3

1	02	02	1.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Labkes)	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana , prasarana dan alat kesehatan	1		1	1	1,00	1	2,00	2
1	02	02	1.01	13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	304		304		-	304	304,00	1
1	02	02	1.01	20	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasyankes yang diampu (peminta konsultasi) di kabupaten/kota yang mampu melaksanakan telemedicine	4	1	2		-	3	4,00	1
1	02	02	1.01	25	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	1	1	1	1,00	1	3,00	3
1	02	02	1.01	27	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Paket Penyediaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	1	1	1	1,00	1	3,00	3

1	02	02	1.01	23	Distribusi Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) ke Kabupaten/Kota	Jumlah Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang Didistribusikan ke Kabupaten/Kota	1			1	-	1	1,00	1
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kab/Kota dengan cakupan pelayanan antenatal sesuai standar minimal 95%	81,82	27,27	45,45	45,45	1,00	63,64	136,36	1,666611111
						Persentase Kab/Kota dengan cakupan Kunjungan Neonatal sesuai standar minimal 95%	81,82	45,45	45,45	45,45	1,00	63,64	154,54	1,888833333
						Persentase Balita Berat Badan Kurang (BB/U)	11,00	3,7	13,00	13	1,00	12,00	28,70	2,609090909
						Persentase Kab/Kota dengan cakupan D/S minimal 70%	81,82	27,27	45,45	45,45	1,00	63,64	136,36	1,666611111
						Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	74,00	68	70,00	70	1,00	72,00	210,00	2,837837838
						Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100,00	100	100,00	25	0,25	100,00	225,00	2,25

						Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100,00	100	100,00	25	0,25	100,00	225,00	2,25
						Persentase Kab/Kota yang mencapai Treatment Coverage TBC minimal 50% (Ditemukan dan Diobati)	63,64	0	36,36	36,36	1,00	54,55	90,91	1,428514286
						Persentase Kab/Kota yang mencapai terduga TBC minimal 70%	54,55				#DIV/0!	45,45	45,45	0,833333333
						Persentase Pengobatan Kasus Malaria sesuai standar	95,00	100	95,00	95	1,00	95,00	290,00	3,052631579
						Persentase ODHA Baru yang memulai ARV	85,00	78	80,00	80	1,00	82,00	240,00	2,823529412
						Persentase Kab/Kota yang orang dengan resiko terinfeksi virus HIV mendapatkan screening minimal 70%	36,36				#DIV/0!	27,27	27,27	0,75
						Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria <1%	4,00	1	3,00	3	1,00	3,00	7,00	1,75

						Persentase Kab/Kota yang 50% Puskesmas melakukan pemeriksaan dan tata laksana pnemonia melalui MTBS	80,00	54,55	60,00	60,00	1,00	70,00	184,55	2,306818182
						Persentase Kab/kota yang melaksanakan Deteksi dini Hepatitis B dan atau Hepatitis C pada populasi beresiko	100,00	100	95,00	95	1,00	100,00	295,00	2,95
						Persentase Kab/kota yang 80 % Puskesmasnya melaksanakan tatalaksana diare sesuai standar	80,00	58	66,00	66	1,00	73,00	197,00	2,4625
						Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat	91,00	61,9	89,00	89	1,00	90,00	240,90	2,647252747
						Persentase Kab/Kota yang mempunyai IR DBD kurang dari 49/100.000 penduduk	82,00	82	64,00	64	1,00	73,00	218,82	2,668514412
						Jumlah Kab/Kota yang memiliki ≥ 20% Puskesmas rujukan Rabies Center	10,00	8	8,00	8	1,00	9,00	25,00	2,5
						Jumlah Kab/kota yang mencapai 95% Imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan	8,00		6,00		-	7,00	7,00	0,875

						Persentase kab/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert system) minimal 80%	100,00	100	81,82	-	100,00	200,00	2	
						Persentase usia produktif ≥ 15 - 59 tahun yang beresiko PTM	45,00	10,51	35,00	35	1,00	40,00	85,51	1,900222222
						Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan Pandu PTM	60,00	30	40,00	40	1,00	50,00	120,00	2
						Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu yang diintegrasikan sebagai Peserta JKN KIS	78.086,00	76.115	77.086,00	66.126	0,86	77.586,00	219.827,00	2,815190943
						Jumlah Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (PBI-JK) mendapat kontribusi dari Pemerintah Provinsi	1.255.000,00	1.019.707	967.815,00	-	1.250.000,00	2.269.707,00	1,808531474	
						Jumlah Fasilitas kesehatan yang melakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan					#DIV/0!	-	#DIV/0!	

1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan Kesehatan Yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	1.515	68554	1.253	16485	13,16	1.377	86.416,00	57,04026403
1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Pada Kondisi Kejadian luar biasa Provinsi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	266	24743	220	1853	8,42	242	26.838,00	100,8947368
1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	3	3	3	1	0,33	3	7,00	2,333333333
1	02	02	1.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	2		2		-	2	2,00	1
1	02	02	1.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	3	3	3	1	0,33	3	7,00	2,333333333
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3	3	3	1	0,33	3	7,00	2,333333333
1	02	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	2	6	2	2	1,00	2	10,00	5

Ranwal Renja Tahun 2026

1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4	4	4	1	0,25	4	9,00	2,25
1	02	02	1.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5	5	5	2	0,40	5	12,00	2,4
1	02	02	1.02	18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Pertemuan LP/LS dalam penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1,00	1	3,00	3
1	02	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	7	1	7	2	0,29	7	10,00	1,428571429
1	02	02	1.02	20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah dokumen hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1	1	1	1	1,00	1	3,00	3
1	02	02	1.02	21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1		1		-	1	1,00	1
1	02	02	1.02	23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety center (PSC 119) tersedia, terkelola dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu	8		4		-	4	4,00	0,5

1	02	02	1.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	2	1	2	1	0,50	2	4,00	2
1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	0	1		-	1	1,00	1
1	02	02	1.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang tersedia	1		1	1	1,00	1	2,00	2
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah fasilitas kesehatan rujukan yang memenuhi persyaratan Survey akreditasi		16			#DIV/0!		16,00	#DIV/0!
						Persentase Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan akreditasi	100,00		100,00	25	0,25	100,00	125,00	1,25
						Persentase Layanan Laboratorium rujukan spesimen, IPTEK dan SDM Laboratorium se Provinsi Jambi			100,00	25	0,25		25,00	#DIV/0!

						Jumlah Parameter Laboratorium Kesmas dan Laboratorium Klinik yang terakreditasi	15,00				#DIV/0!	10,00	10,00	0,666666667
1	02	02	1.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	11	4	11	3	0,27	11	18,00	1,636363636
1	02	02	1.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar	38	32	34	3	0,09	36	71,00	1,868421053
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas kesehatan yang melakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	36	32	32	1	0,03	34	67,00	1,861111111
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Labkes)	Jumlah Fasilitas kesehatan yang melakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	1	0	1	1	1,00	1	2,00	2
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas lengkap 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	48,00	56,7	43,00	43	1,00	46,00	145,70	3,035416667

						Persentase RSUD Kabupaten/Kota Kelas C yang memiliki 7 Dokter Spesialis lengkap	98,00	100	96,00	96	1,00	97,00	293,00	2,989795918
						Persentase Puskesmas Tanpa Dokter	-	0,48	1,00	1,00	1,00	-	1,48	#DIV/0!
						Persentase Tenaga Kesehatan yang mendapatkan pelatihan terstandar	65,90	51,38	56,80	56,73	1,00	61,35	169,46	2,571471927
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase Pemenuhan kebutuhan SDM di Fasyankes sesuai standar	48,00	56,7	43,00	0	-	46,00	102,70	2,139583333
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasyankes	23.097	23.800	20.950		-	21.997	45.797,00	1,982811621
1	02	03	1.01	02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang terdistribusi	273		254		-	260	260,00	0,952380952
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	95,24	78	86,38	86,38	1,00	90,70	255,08	2,678286434
						Akreditasi layanan Pendidikan dan Pelatihan yang memenuhi		B	B		#VALUE!		#VALUE!	#VALUE!

						standar pelatihan								
						persentase SDMK mengikuti pelatihan terakreditasi yang mendapatkan sertifikat	100,00				#DIV/0!	100,00	100,00	1
						Persentase Tenaga Kesehatan yang mendapatkan pelatihan terstandar		100	100%	58,8	58,80		158,80	#DIV/0!
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (Bapelkes)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi meningkat	750,00	269	450,00	50	0,11	600,00	919,00	1,225333333
1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	11,00	11	11,00	11	1,00	11,00	33,00	3
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian dan alkes yang berizin	100,00	100	100,00	25	0,25	100,00	225,00	2,25
						Persentase usaha kecil obat tradisional (UKOT) yang memenuhi ketentuan perizinan	100,00				#DIV/0!	100,00	100,00	1

						Persentase pedagang besar farmasi (PBF) dan Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang memenuhi ketentuan perizinan	100,00				#DIV/0!	100,00	100,00	1
1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase pedagang besar farmasi (PBF) yang memenuhi ketentuan perizinan	100,00	100	100,00	25	0,25	100,00	225,00	2,25
						Persentase Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang memenuhi ketentuan perizinan	100,00	100	100,00	25	0,25	100,00	225,00	2,25
						Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang direkomendasikan untuk mendapatkan perizinan					#DIV/0!		-	#DIV/0!
1	02	04	1.01	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka Penerbitan dan tindak lanjut penerbitan perizinan	44 sarana (22 PBF Cabang dan 22 PAK Cabang)	40	40 sarana (22 PBF Cabang dan 18 PAK Cabang)		#VALUE!	44 sarana (22 PBF Cabang dan 22 PAK Cabang)	#VALUE!	#VALUE!

1	02	04	1.01	02	Penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Jumlah data Perizinan Pengakuan PBF Cabang yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	2	2	2	-	2	4,00	2	
1	02	04	1.02		Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase usaha kecil obat tradisional (UKOT) yang memenuhi ketentuan perizinan	100,00	100	100,00	25	0,25	100,00	225,00	2,25
						Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang direkomendasikan untuk mendapatkan perizinan				#DIV/0!		-	#DIV/0!	
1	02	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka Penerbitan dan tindak lanjut penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	4	3	3	3	1,00	3	9,00	2,25
1	02	04	1.02	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen hasil Data Sarana UKOT Yang Sudah Menerapkan Perizinan Berbasis Elektronik	1	1	1	1	1,00	1	3,00	3

1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kabupaten/Kota Sehat	8,00	6	6,00	0	-	8,00	14,00	1,75
						Persentase Kab/Kota yang menerapkan kebijakan germas					#DIV/0!	8 kab (72,72%)	#VALUE!	#VALUE!
1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kab/Kota yang menerapkan kebijakan germas	9 kab (81,81%)	54,55	7 kab (63,63)	2	#VALUE!	8 kab (72,72%)	#VALUE!	#VALUE!
											#DIV/0!		-	#DIV/0!
						Persentase Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)/ODF	70	63,19	50	50	1,00	60	173,19	2,474142857
1	02	05	1.01	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Promkes +Kesling)	Jumlah dokumen hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	3	2	3	3	1,00	3	8,00	2,666666667
1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah	Jumlah Tema Pesan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) program kesehatan	10 Tema	10	10	5	0,50	10	25,00	#VALUE!

Ranwal Renja Tahun 2026

					Provinsi									
1	02	05	1.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1	1	1	1	1,00	1	3,00	3
1	02	05	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 80% posyandu aktif	36,36		18,18	18,18	1,00	27,27	45,45	1,24995
1	02	05	1.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1		1	1	1,00	1	2,00	2

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada tahun 2024 kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi sasaran strategis secara menyeluruh dari seluruh indikator rata-rata mencapai kinerja sebesar 101.26 %. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023 hanya mencapai 97,59% maka pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 3,67%.

Dalam upaya pencapaian tujuan “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat” yang sasaran kerjanya “Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan”, dilakukan beberapa kegiatan dan program dengan indikator sebagai berikut :

Tabel T-C.30.

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT													
1	Angka Usia Harapan Hidup			71,4	71,52	71,64	71,76	71,77	71,77				
2	Angka kematian ibu (AKI)			56	53	50	47	53	42				
3	Angka kematian Bayi			333	323	313	303	366	323				
4	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita			14	12	11	10	13,5	13,5				
5	Prevalensi wasting pada balita			7,5	7,3	7	6,8	6,6	6,6				
6	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)			362	358	354	350	362	358				

7	Persentas angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC succes rate)				90	90	90		87				
8	Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART)				55	60	65		64				
9	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun			8,8	8,7	8,6	8,5	8,8	8,8				
10	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan			82	88	92	96	100,4	64,24				
11	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria			9	9	9	9	7	8				
12	Persentase usaha kecil obat tradisional (UKOT) yang memenuhi ketentuan perizinan			100	100	100	100	100	100				
13	Persentase pedagang besar farmasi (PBF) yang memenuhi ketentuan perizinan			100	100	100	100	100	100				
14	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%)				100	100	100		100				
ASPEK PELAYANAN UMUM													
Fokus Pelayanan Urusan Wajib													
<i>Kesehatan</i>													
15	Persentase RS Rujukan Provinsi yang terakreditasi			100	100	100	100	100	100				

16	Persentase FKTP yang terakreditasi				100	100	100		100				
17	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana			100	100	100	100	100	100				
18	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)			100	100	100	100	100	100				
19	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar			43	46	48	50	50,24	68,75				
20	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan			1,24	1,24	1,28	1,32	1,32	1,32				
21	Rasio Puskesmas per Kecamatan				0,95	0,95	1		0,99				
22	Persentase Universal Health Coverage (UHC)			83	93	94	95	87,15	93,88				
23	Jumlah Kabupaten/Kota Sehat				7	7	8		8				

Tabel 2.2.1
Indikator Meningkatnya Kinerja Akses Pelayanan Kesehatan Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2023		Realisasi (%)
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Rasio Tempat Tidur per Jumlah penduduk	1 : 1,32	1 : 1,32	100%
		Rasio Puskesmas Per Kecamatan	1 : 0,98	1 : 0,98	100%

Rasio tempat tidur rumah sakit di Provinsi Jambi tahun 2024 sebesar 1 : 1,3 artinya Provinsi Jambi memiliki 1 tempat tidur rumah sakit per 1000 penduduknya. Dengan rincian per kabupaten/kota sebagai berikut :

Tabel 2.2.2
Rasio Rumah Sakit per 1000 Penduduk Kabupaten/Kota Tahun 2024

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH RUMAH SAKIT	TT	RASIO
1	2	3	4	5	6
1	Kerinci	255,120	-	-	-
2	Merangin	368,389	4	422	1,1
3	Sarolangun	302,243	2	256	0,8
4	Batanghari	312,243	2	261	0,8
5	Muaro Jambi	418,799	3	224	0,5
6	TanjungJabungTimur	250,91	1	109	0,4
7	TanjungJabung Barat	170,11	2	195	1,1
8	Tebo	350,76	2	202	0,6
9	Bungo	376,382	6	488	1,3
10	Kota Jambi	627,774	17	2.290	3,65
11	Kota Sungai Penuh	107,83	3	273	2,5
	Provinsi	3540,56	42	4.720	1,3

Secara Provinsi, Tahun 2024 Jambi telah memenuhi rasio tempat tidur yang telah ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) memiliki satu tempat tidur RS untuk setiap 1.000 penduduk, dengan capaian Provinsi Jambi sebesar 1,3 per 1.000 penduduk.

Namun terdapat 5 (lima) kabupaten/kota yang memiliki rasio tempat di bawah 1 tempat tidur per 1.000 penduduk,yaitu; Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan kabupaten dengan rasio paling rendah yaitu 0,4 tempat tidur per 1.000 penduduk, artinya Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya memiliki 40 tempat tidur rumah sakit per 10.000 penduduknya.

Sebaran Jumlah tempat tidur rumah sakit di Provinsi Jambi pada tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2.3
Jumlah daya tampungTempat Tidur Rumah Sakit di Provinsi Jambi Tahun 2024

NO	NAMA RUMAH SAKIT RUJUKAN	STATUS		JUMLAH DAYA TAMPUNG (TEMPAT TIDUR)	KET
		NEGERI	SWASTA		
1	RSUD RADEN MATTAHER	√		400	
2	RUMAH SAKIT JIWA	√		230	
3	RSUD H ABDUL MANAP KOTA JAMBI	√		180	
4	RSUD ABDURRAHMAN SAYOETI KOTA JAMBI	√		50	
5	RSU BRATANATA KOTA JAMBI	√		194	
6	RSU BHAYANGKARA KOTA JAMBI	√		199	
7	RSU ST THERESIA KOTA JAMBI		√	100	
8	RSU SILOAM HOSPITAL KOTA JAMBI		√	108	
9	RSIA ANNISA KOTA JAMBI		√	73	
10	RSU ISLAM ARAFAH KOTA JAMBI		√	103	
11	RSU KAMBANG KOTA JAMBI		√	106	
12	RSU RIMBO MEDIKA KOTA JAMBI		√	33	
13	RSU ROYAL PRIMA KOTA JAMBI		√	155	
14	RSU BAITURRAHIM KOTA JAMBI		√	100	
15	RSU ERNI MEDIKA KOTA JAMBI		√	55	
16	RSU MITRA KOTA JAMBI		√	101	
17	RSU RAPHA THERESIA		√	100	
18	RSUD HA THALIB KOTA SUNGAI PENUH	√		168	

19	RSU MELATI KOTA SEI PENUH		√	53	
20	RSUD H.BAKRI KOTA SUNGAI PENUH	√		52	
21	RSUD ABUNDJANI KAB MERANGIN	√		184	
22	RSU RAUDAH KAB MERANGIN		√	100	
23	RSU ANDIMAS KAB MERANGIN		√	51	
24	RSU MERANGIN MEDICAL CENTER KAB MERANGIN		√	76	
25	RSUD PROF DR CHATIB QUZWAIN KAB SAROLANGUN	√		156	
26	RSU LANGIT GOLDEN MEDIKA KAB SAROLANGUN		√	100	
27	RSUD H.HANAFIE KAB BUNGO	√		219	
28	RSIA PERMATA HATI KAB BUNGO		√	114	
29	RSIA MOELIA KAB BUNGO		√	41	
30	RSU JABAL RAHMAH KAB BUNGO		√	84	
31	RSUD RANTAU IKIL KAB BUNGO	√		25	
32	RSUD KUAMANG KUNING KAB BUNGO	√		15	
33	RSUD SULTAN THAHA SYAIFUDDIN KAB TEBO	√		134	
34	RSU SETIA BUDI KAB TEBO		√	68	
35	RSUD H ABDOEL MADJID BATOE KAB BT HARI	√		160	
36	RSU MITRA MEDIKA KAB BT HARI		√	101	
37	RSUD AHMAD RIPIN KAB.MA JAMBI	√		103	
38	RSUD SUNGAI BAHAR KAB MA JAMBI	√		51	
39	RSUD SEI GELAM KAB MA JAMBI	√		70	
40	RSUD DAUD ARIF KAB TANJAB BARAT	√		131	
41	RSUD SURYAH KHAIRUDDIN KAB TANJAB BARAT	√		64	
42	RSUD NURDIN HAMZAH KAB TANJAB TIMUR	√		109	
43	RSUD BUKIT KERMEN KAB KERINCI	v		52	
44	RSUD RANTAU RASAU KAB TANJAB TIMUR	v		50	
JUMLAH		23	21	4.818	

Total tempat tidur rumah sakit yang paling banyak adalah RSUD Raden Mattaher dengan 400 jumlah tempat tidur, kemudian Rumah Sakit Jiwa sebanyak 230 tempat tidur. Total tempat tidur yang paling sedikit adalah RSUD Kuamang Kuning di Kabupaten Bungo dengan jumlah tempat tidur hanya 15 tempat tidur.

Terdapat 7 RS yang mengalami penurunan jumlah tempat tidur, yaitu: RS Jiwa, RSUD Bhayangkara, RSUD Rapha Theresia, RSUD Langit Golden Medika, RSUD Suryah Khairuddin, RSUD Mitra Medika Batanghari. Hal ini terjadi karena beberapa hal antara lain :

- a. RSJ jumlah tempat tidur berkurang Karena dibukanya ruangan fisik non jiwa
- b. Mengikuti peraturan Kemenkes RI mengenai penerapan kelas rawat inap standar (KRIS) sehingga jumlah tempat tidur banyak dikurangi agar memenuhi syarat (kelas 3 biasanya 6 TT menjadi 4 TT, selanjutnya untuk ICU, PICU, NICU harus 6% dari jumlah total TT, RS tidak bisa menambah TT karena peraturan jarak antar bed/TT dan terkendala ruangan).
- c. RSUD Suryah Khairuddin pengurangan terjadi karena pengalihan ruangan rawat inap yang dijadikan ruang poli, kemudian jumlah TT yang dilaporkan sebesar SK terbaru merupakan jumlah asset bukan jumlah TT yang sebenarnya. (ini terjadi karena saat covid yang mengharuskan menambah TT), hal ini mengakibatkan indikator RS menjadi rendah (BOR), maka diturunkan jumlah TT untuk memenuhi standar indikator layanan.
- d. Untuk RS Langit Golden Medika, penurunan jumlah TT karena adanya renovasi ruangan kelas2 dan kelas 3 menjadi ruangan HCU dan NICU
- e. Terdapat 5 RS yang melakukan penambahan jumlah TT, yakni RSUD Abdurrahkan Sayoeti, RSUD Rimbo Medika, RSUD Royal Prima, RSUD H. Abdoel Madjid Batoe, dan RSUD Daud Arif
- f. Terdapat penambahan 2 RS baru tahun 2023 yaitu RSUD H. Bakri Kota Sungai Penuh dan RSUD Kuamang Kuning Bungo, serta 2RS di tahun 2024; RSUD Rantau Rasau Tanjung Jabung Timur dan RS Bukit Kerman Kerinci.

Berdasarkan Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standar Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) harus memenuhi batas minimal 60%. Pada Tahun 2023, Rumah Sakit Milik Pemerintah yang memenuhi standar SPA 60% sebanyak 14 Rumah Sakit dari 19 Rumah Sakit Milik Pemerintah (73,7%). Hal ini dapat dilihat pada data berikut:

Tabel 2.2.4

Rumah Sakit Pemerintah yang memenuhi standar SPA

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Penyediaan fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, UKM Rujukan	Persentase Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah yang Memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar	82,35 %	73,7%

Sumber : Seksi Yankes Rujukan, Bidang Yankes, 2023

Untuk melihat jumlah rumah sakit yang telah memenuhi standar Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) batas minimal 60% dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.6

Jumlah Rumah Sakit di Provinsi Jambi Yang Telah Memenuhi SPATahun 2023

No.	Rumah Sakit	Lokasi	Kelengkapan			Kumulasi (50S+20P +30A)
			Sarana	Prasarana	Alat Kesehatan	
Jambi						
1	1502014 RS Umum Daerah Kolonel Abundjani/Bangko	C Pemkab Kab. Merangin	69,39	77,27	26,72	58,17
2	1503036 RS Umum Daerah Prof. Dr. H. Chatib Quzwain	C Pemkab Kab. Sarolangun	47,23	75	30,9	47,88
3	1504015 RS Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe	C Pemkab Kab. Batanghari	76,09	100	42,4	70,77
4	1505016 RS Umum Daerah Ahmad Ripin	C Pemkab Kab. Muaro Jambi	86,59	52,27	29,38	62,56
5	1505027 RS Umum Daerah Sungai Bahar	D Pemkab Kab. Muaro Jambi	100	72,09	27,65	72,71
6	1505028 RS Umum Daerah Sungai Gelam	D Pemkab Kab. Muaro Jambi	100	44,19	29,17	67,59
7	1506011 RS Umum Daerah Nurdin Hamzah	C Pemkab Kab. Tanjung Jabung Timur	100	79,07	37,84	77,16
8	1507010 RS Umum Daerah KH. Daud Arif	C Pemkab Kab. Tanjung Jabung Barat	75,22	97,73	27,12	65,29
9	1507013 RS Umum Daerah Suryah Khairuddin	D Pemkab Kab. Tanjung Jabung Barat	100	81,4	22,92	73,15

Ranwal Renja Tahun 2026

10	1508013	RS Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin	C	Pemkab	Kab. Tebo	86,3	84,09	44,41	73,29
11	1509013	RS Umum Daerah H. Hanafie	B	Pemkab	Kab. Bungo	100	74,42	62,52	83,64
12	1509043	RS Kuamang Kuning	D	Pemkab	Kab. Bungo	8,29	100	5,26	25,72
13	1509042	RS Umum Daerah Rantau Iki	D	Pemkab	Kab. Bungo	20,21	27,91	16,67	20,69
14	1571012	RS Umum Daerah Raden Mattaheer Jambi	B	Propinsi	Kota Jambi	100	100	70,99	91,3
15	1571136	RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi	Khusus Jiwa B	Propinsi	Kota Jambi	100	87,8	30,05	76,58
16	1571158	RS Umum Daerah H. Abdul Manap	C	Pemkot	Kota Jambi	92,42	100	44,9	79,68
17	1571169	RS Umum Daerah H. Abdurrahman Sayoeti	D	Pemkot	Kota Jambi	92,23	67,44	60,21	77,66
18	1501012	RS Umum Daerah Mayjen H. A. Thalib	C	Pemkot	Kota Sungai Penuh	77,55	77,27	34,65	64,62
19	1572014	RS Umum Daerah H. Bakri Kota Sungai Penuh	D	Pemkot	Kota Sungai Penuh	76,17	46,51	19,54	53,25

Sumber : Seksi Yankes Rujukan, Bidang Yankes, 2024

Dari 19 Rumah Sakit Pemerintah ada 5 Rumah Sakit yang Kelengkapan SPA nya di bawah 60% antara lain :

1. RS Umum Daerah Kolonel Abundjani/Bangko
2. RS Umum Daerah Prof. Dr. H. Chatib Quzwain/Sarolangun
3. RS Kuamang Kuning/Bungo
4. RS Umum Daerah Rantau Iki/Bungol
5. RS Umum Daerah H. Bakri Kota Sungai Penuh

Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa Rumah Sakit telah memenuhi Standar Akreditasi. Akreditasi Rumah sakit dilaksanakan untuk menilai kepatuhan rumah sakit terhadap standar akreditasi. Dengan penerapan standar akreditasi mendorong peningkatan pelayanan rumah sakit yang lebih berkualitas dan peningkatan Kerjasama antara disiplin profesi dalam perawatan pasien, yang dapat meningkatkan mutu pelayanan dan menambah kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit.

Provinsi Jambi sampai tahun 2024 telah melaksanakan akreditasi rumah sakit sebanyak 38 rumah sakit dari 44 rumah sakit yang ada di provinsi jambi atau sekitar 86,36%, dengan rincian perkabupaten kota sebagai berikut :

Ranwal Renja Tahun 2026

Tabel 2.2.7
Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi di Kabupaten/Kota Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2023		Keterangan	
		Jumlah RS	Terakreditasi	Status	Belum Terakreditasi
1	2	3	4	5	6
1	Batang Hari	2	2	0	0
2	Muaro Jambi	3	3	0	0
3	Tanjab Barat	2	2	0	0
4	Tanjab Timur	2	1	0	1
5	Kota Jambi	15	14	0	1
6	Bungo	6	4	0	2
7	Tebo	2	2	0	0
8	Merangin	4	4	0	0
9	Sarolangun	2	2	0	0
10	Kerinci	1	0	0	1
11	Sungai Penuh	3	2	0	1
12	Provinsi	2	2	0	0
	JUMLAH	44	38	0	6

Sumber : Seksi Yankes Rujukan, Bidang Yankes, 2024

Dari 44 (empat puluh empat) Rumah Sakit di Provinsi Jambi, RS yang sudah terakreditasi sebanyak 38 Rumah Sakit dan 6 Rumah sakit belum terakreditasi. Rumah Sakit yang belum terakreditasi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2.9
Daftar Rumah Sakit Belum Terakreditasi Tahun 2024

No	Nama Rumah Sakit	Kelas	Pemilik	Kab / Kota	Provinsi
1	2	3	4	5	6
1	RS .Erni Medika	D	Swasta	Kota Jambi	JAMBI
2	RSUD Rantau Ikil	D	Pemda	Bungo	JAMBI

Ranwal Renja Tahun 2026

3	RSUD H. Bakri	D	Swasta	Sei Penuh	JAMBI
4	RSUD Kuamang Kuning	D	Swasta	Bungo	JAMBI

Sumber : Seksi Yankes Rujukan, Bidang Yankes, 2024

Dalam rangka meningkatkan program upaya kesehatan masyarakat melalui peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) maka setiap Puskesmas diwajibkan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar akreditasi.

Tabel 2.10
Rasio Puskesmas Per Kecamatan
Per Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023

NO.	KAB/KOTA	PENDUDUK	PUSKESMAS	KEC	RASIO/KEC	RASIO/PDDK
1	2	3	4	5	6	7
1	KERINCI	21	18	1,17	KERINCI	21
2	MERANGIN	27	24	1,13	MERANGIN	27
3	SAROLANGUN	16	11	1,45	SAROLANGUN	16
4	BATANG HARI	18	8	2,25	BATANG HARI	18
5	MUARO JAMBI	23	11	2,09	MUARO JAMBI	23
6	TANJAB TIMUR	17	11	1,55	TANJAB TIMUR	17
7	TANJAB BARAT	16	13	1,23	TANJAB BARAT	16
8	TEBO	20	12	1,67	TEBO	20
9	BUNGO	19	17	1,12	BUNGO	19
10	KOTA JAMBI	20	11	1,82	KOTA JAMBI	20
11	KOTA SUNGAI PENUH	11	8	1,38	KOTA SUNGAI PENUH	11
	JUMLAH	208	144	1,44	JUMLAH	208

Sumber : Seksi Yankes Primer, Bidang Yankes, 2024

Provinsi Jambi memiliki 144 kecamatan dengan 208 puskesmas, jumlah puskesmas lebih banyak dari jumlah kecamatan dikarenakan terdapat satu kecamatan dengan lebih dari satu puskesmas, sehingga Rasio Puskesmas per Kecamatan 1,44 artinya bahwa dalam satu kecamatan terdapat 1 sampai 2 puskesmas. Namun masih ada Kecamatan yang belum memiliki puskesmas yaitu Kecamatan Air Hangat dan Kecamatan Tanah Cogok yang terdapat pada Kabupaten Kerinci. Hal ini disebabkan belum mendapatkan lahan/tanah (proses hibah) untuk pembangunan puskesmas, hal ini telah berlangsung sejak tahun 2021.

Selain Rasio Puskesmas perlu juga kami gambarkan puskesmas terakreditasi tahun 2024 . Seperti diketahui bahwa tujuan utama akreditasi puskesmas adalah untuk pembinaan peningkatan mutu, kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan program, serta penerapan manajemen resiko. Tahun 2024 indikator minimal 1 puskesmas setiap kecamatan yang terakreditasi di wilayah Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Cakupan Kecamatan dengan satu Puskesmas Terakreditasi
Per Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2024

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KECAMATAN DENGAN 1 PUSKESMAS TERAKREDITASI	PERSENTASE KECAMATAN MEMPUYAI PUSKESMAS TERAKREDITASI
1	2	3	4	5
1	KERINCI	18	16	88
2	MERANGIN	24	24	100
3	SAROLANGUN	11	11	100
4	BATANGHARI	8	8	100
5	MUARO JAMBI	11	11	100
6	TANJAB TIMUR	11	11	100
7	TANJAB BARAT	13	13	100
8	TEBO	12	12	100
9	BUNGO	17	17	100
10	KOTA JAMBI	11	11	100
11	KOTA SUNGAI PENUH	8	8	100
	TAHUN 2023	144	142	99

Sumber : Seksi Yankes Primer, Bidang Yankes, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah Kecamatan dengan 1 puskesmas terakreditasi sebanyak 142 dari 144 kecamatan (99%). Bila dilihat berdasarkan kabupaten/kota, maka masih ada 1 kabupaten/kota yang Kecamatannya belum mencapai 100% untuk kecamatan dengan 1 Puskesmas terakreditasi yaitu Kabupaten Kerinci.

Jumlah Puskesmas Akreditasi di Provinsi Jambi tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Jumlah Puskesmas Terakreditasi
Per Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2024

NO	KAB/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	JLH PKM TERAKREDITASI	PERSENTASE PUSKESMAS TERAKREDITASI
1	KERINCI	21	21	100.00
2	MERANGIN	27	27	100.00
3	SAROLANGUN	16	16	100.00
4	BATANGHARI	18	18	100.00
5	MUARO JAMBI	23	23	100.00
6	TANJAB TIMUR	17	17	100.00
7	TANJAB BARAT	16	16	100.00
8	TEBO	20	20	100.00
9	BUNGO	19	19	100.00
10	KOTA JAMBI	20	20	100.00
11	KOTA SUNGAI PENUH	11	11	100.00
	JUMLAH	208	208	100.00

Pada tahun 2024 seluruh puskesmas (208 puskesmas) yang ada di provinsi Jambi telah terakreditasi, hal ini terjadi peningkatan di dibandingkan tahun 2023 yang hanya 202 puskesmas terakreditasi.

Status Akreditasi Puskesmas Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	KAB/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	STATUS AWAL AKREDITASI					TOTAL
			DASAR	MADYA	UTAMA	PARIPURNA	PERDANA	
1	KERINCI	21	0	6	12	3	0	21
2	MERANGIN	27	0	1	20	6	0	27
3	SAROLANGUN	16	0	1	9	6	0	16
4	BATANGHARI	18	0	1	8	9	0	18
5	MUARO JAMBI	23	0	7	12	4	0	23
6	TANJAB TIMUR	17	0	1	12	4	0	17
7	TANJAB BARAT	16	0	0	10	6	0	16
8	TEBO	20	0	3	5	12	0	20
9	BUNGO	19	0	3	14	2	0	19
10	KOTA JAMBI	20	0	0	6	14	0	20
11	KOTA SUNGAI PENUH	11	0	2	7	2	0	11
	JUMLAH	208	0	25	115	68	0	208

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jumlah puskesmas terakreditasi dengan Status Madya ada 25 puskesmas, Status Utama ada 115 puskesmas, dan Status Paripurna ada 68 puskesmas.

Berdasarkan Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, FKTP yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standar Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) harus memenuhi batas minimal 60%. Pada Tahun 2024, Puskesmas yang memenuhi standar SPA 60% sebanyak 127 Puskesmas dari 208 Puskesmas (61,06%). Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Penyediaan fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, UKM Rujukan	Persentase FKTP mempunyai Sarana Prasarana Alat kesehatan dan pelayanan sesuai Standar	60 %	61,06%

Berikut data capaian puskesmas yang telah memenuhi standar Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) batas minimal 60% berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Jambi dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.13
Jumlah Puskesmas per Kabupaten /Kota dalam Pemenuhan Standar Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (Treshold 60%)

No	Nama Wilayah	Jumlah Puskesmas	Realisasi 2023	Realisasi (%)
1	Kab. Kerinci	21	17	80,95
2	Kab. Merangin	27	19	70,37
3	Kab. Sarolangun	16	11	68,75
4	Kab. Batang Hari	18	12	66,67
5	Kab. Muaro Jambi	23	20	86,96
6	Kab. Tanjung Jabung Timur	17	16	94,12
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	16	13	81,25
8	Kab. Tebo	20	7	35
9	Kab. Bungo	19	17	89,47
10	Kota Jambi	20	20	100
11	Kota Sungai Penuh	11	9	81,82
	Provinsi Jambi	208	161	77,40

Sumber : Seksi Yankes Primer, Bidang Yankes, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pemenuhan SPA Puskesmas telah mencapai 77,40% dari target pemenuhan 65%. Namun demikian, bila dilihat berdasarkan kabupaten/kota masih ada kabupaten/kota yang belum memenuhi syarat 60% yaitu Kabupaten Tebo.

2.2.2 . SASARAN 2 Menurunkan Kematian Ibu, Bayi dan Stunting

Dalam upaya pencapaian tujuan “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat” yang sasaran kinerjanya “ Menurunkan Kematian Ibu, Bayi, dan Stunting,” dilakukan beberapa kegiatan dan program yaitu Program Kesehatan Ibu dan Anak. Dengan indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.12
Indikator Menurunkan Kematian Ibu, Bayi, dan Stunting Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2023		Realisasi (%)
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1.	Menurunkan Kematian Ibu, Bayi dan stunting	Penurunan Jumlah Kematian Ibu	53	44	120
		Penurunan Jumlah Kematian Bayi	323	354	91,2
		Prevalensi Balita Stunting	12	13,5	88,8

1. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup (KH)

Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih cukup tinggi walaupun dalam beberapa decade terakhir AKI telah mengalami penurunan. Data terakhir AKI masih 306/100.000 Kelahiran Hidup (SUPAS 2015). Untuk mendapatkan capaian indikator terkait Angka Kematian Ibu (AKI) ini harus melalui Survey, sampai saat ini Provinsi Jambi untuk Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup tidak bisa dihitung karena jumlah kelahiran hidup tidak sampai 100.000. Pada tahun 2024 jumlah kelahiran hidup hanya 65.774 kelahiran hidup. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.13
Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Jambi Tahun 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	JUMLAH LAHIR HIDUP	KEMATIAN IBU			
				JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL	JUMLAH KEMATIAN IBU BERSALIN	JUMLAH KEMATIAN IBU NIFAS	JUMLAH KEMATIAN IBU
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KERINCI	21	4.079	2	2	1	5
2	MERANGIN	27	6.597	1	1	2	4

3	SAROLANGUN	16	6.251	2	3	1	6
4	BATANGHARI	18	5.685	1	0	3	4
5	MUARO JAMBI	23	7.256	0	0	2	2
6	TANJAB TIMUR	17	6.299	0	1	2	3
7	TANJAB BARAT	16	4.196	2	0	1	3
8	TEBO	20	6.793	3	2	2	7
9	BUNGO	19	6.640	1	1	2	4
10	KOTA JAMBI	20	10.368	3	0	2	5
11	KOTA SUNGAI PENUH	11	1.610	0	1	0	1
	Provinsi	208	65.774	15	11	18	44

Sumber : Seksi Kesga, Bidang Kesmas, 2023

Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Jambi dihitung dengan konversi/prediksi dikarenakan jumlah kelahiran hidup di bawah 100.000 KH. Pada tahun 2024 terdapat jumlah kematian sebesar 44 kematian dari 65.774 KH, (artinya terdapat kematian ibu sebanyak 67 orang dari 100.000 KH). AKI ini turun dibandingkan tahun 2023, dimana terdapat kematian sebanyak 53 orang atau terdapat kematian ibu sebanyak 80 orang dari 100.000 KH. Jumlah kematian ibu tertinggi terjadi di kabupaten tebo yaitu 7 kasus, sedangkan paling rendah di kota sungai penuh hanya 1 kasus.

Pada tahun 2024 penyebab kematian ibu dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.14
Penyebab Kematian Ibu di Provinsi Jambi Tahun 2024

	KABUPATE N/KOTA	JUMLAH PUSKES MAS	PENYEBAB KEMATIAN IBU									JUMLAH KEMATIAN IBU
			PERD ARAH AN	GANG GUAN HIPER TENSI	INFEK SI	KELAIN AN JANTU NG DAN PEMBU LUH DARAH	GANG GUAN AUTO IMUN	GANG GUAN CERE BRO VASK ULAR	COVI D-19	KOMPLIKASI PASCA KEGUGURAN (ABORTUS)	LAIN- LAIN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kerinci	21	2	1	0	0	0	0	0	0	2	5
2	Merangin	27	1	3	0	0	0	0	0	0	0	4
3	Sarolangun	16	2	3	0	0	0	0	0	0	1	6
4	Batanghari	18	0	0	1	0	0	0	0	0	3	4
5	Muaro Jambi	23	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2

Ranwal Renja Tahun 2026

6	Tanjab Timur	17	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3
7	Tanjab Barat	16	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3
8	Tebo	20	1	3	0	0	0	0	0	1	2	7
9	Bungo	19	1	2	0	0	0	0	0	0	1	4
10	Kota Jambi	20	0	2	1	0	0	0	0	0	2	5
11	Kota Sungai Penuh	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Provinsi		208	10	14	3	0	0	0	0	1	16	44

Dari tabel diatas dapat dilihat penyebab kematian terbanyak adalah lain-lain sebanyak 16 orang (36,36%), kemudian Hipertensi sebanyak 14 orang (31,81%), Perdarahan sebanyak 10 orang (22,72 %), Infeksi sebanyak 3 orang (6,81%), Abortus sebanyak 1 orang (2,2%).

Adapun langkah strategis kedepan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu adalah sebagai berikut:

- 1) Pembentukan TIM AMP (Audit Maternal Perinatal) di Dinas kesehatan yang mendampingi di semua puskesmas.
- 2) Optimalisasi Media Sosial (Wa grup Ibu hamil) di wilayah kerja puskesmas, untuk meningkatkan kesadaran ibu dalam melakukan pemeriksaan kesehatan.

Cakupan pelayanan ibu hamil (K4) adalah : Cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali.

Persalinan oleh tenaga Kesehatan adalah : ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

Tabel 2.15

Cakupan Kunjungan Antenatal (ANC) sesuai standar 95%
Di Provinsi Jambi Tahun 2024

NO	Wilayah	IBU HAMIL	Jumlah K1		Jumlah K4		Jumlah K6	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	6	7
1	KERINCI	4.312	3.059	70,94	299	9,77	2.591	84,7
2	MERANGIN	6.916	4.553	65,83	744	16,34	3.222	70,8
3	SAROLANGUN	6.678	6.049	90,58	366	6,05	5.259	86,9
4	BATANGHARI	5.934	4.447	74,94	113	2,54	4.618	103,8
5	MUARO JAMBI	7.621	5.069	66,51	-	0,00	-	0,0
6	TANJAB TIMUR	6.574	5.475	83,28	699	12,77	5.103	93,2
7	TANJAB BARAT	4.412	2.209	50,07	-	0,00	-	0,0
8	TEBO	7.126	5.068	71,12	721	14,23	4.126	81,4
9	BUNGO	7.025	5.722	81,45	543	9,49	4.199	73,4
10	KOTA JAMBI	10.701	10.566	98,74	830	7,86	10.521	99,6
11	KOTA SUNGAI PENUH	1.725	900	52,17	77	8,56	928	103,1
	TOTAL	69.024	53.117	76,95	4.392	8,27	40.567	76,4

Sumber : Seksi Kesga, Bidang Kesmas, 2024

Dari data di atas dapat di lihat bahwa Cakupan Kunjungan Antenatal (K6) dari 69.024 jumlah ibu hamil di peroleh ANC rata-rata 40.567 atau 76,4% artinya target tahun 2024 yaitu 95% belum tercapai, hal ini disebabkan data masih dalam proses penginputan.

2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi di Indonesia masih cukup tinggi, data terakhir AKB 24 per 1000 kelahiran hidup (SDKI 2017) Untuk mendapatkan capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) ini harus melalui Survey, sampai saat ini Hasil Survey untuk Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup belum ada hasil yang resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Untuk menjawab indikator ini, kami akan menampilkan tabel seperti dibawah ini.

Tabel 2.16
Jumlah Kematian Neonatal, Post Neonatal, Bayi dan Balita
Di Provinsi Jambi Tahun 2024

NO	Kabupaten/ Kota	Puskesmas	Jumlah Lahir Hidup	JUMLAH KEMATIAN					AKB
				LAKI - LAKI + PEREMPUAN					
				NEONAT AL	POST NEONATAL	BALITA			
						BAYI	ANAK BALITA	JUMLAH TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KERINCI	21	4.079	21	1	22	1	23	5,39
2	MERANGIN	27	6.597	34	1	35	1	36	5,31
3	SAROLANG UN	16	6.251	16	1	17	0	17	2,72
4	BATANGHA RI	18	5.685	31	4	35	0	35	6,16
5	MUARO JAMBI	23	7.256	32	1	33	0	33	4,55
6	TANJAB TIMUR	17	6.299	13	1	14	0	14	2,22
7	TANJAB BARAT	16	4.196	23	1	24	0	24	5,72
8	TEBO	20	6.793	59	8	67	5	72	9,86
9	BUNGO	19	6.640	54	5	59	0	59	8,89
10	KOTA JAMBI	20	10.368	39	1	40	0	40	3,86
11	KOTA SUNGAI PENUH	11	1.610	8	0	8	0	8	4,97
	Provinsi	208	65.774	330	24	354	7	361	5,38

Sumber : Seksi Kesga, Bidang Kesmas, 2024

Ranwal Renja Tahun 2026

Pada tabel diatas dapat di lihat pada tahun 2024 jumlah kematian bayi sebanyak 354 bayi. Jika kita bandingkan dengan kasus tahun 2023 sebanyak 360 bayi maka tahun 2024 ini mengalami penurunan sebanyak 6 kasus.

Dilihat dari jumlah kematian neonatal (umur 0-6 hari) meninggal 330 bayi, bayi post neonatal (umur 7-28 hari) jumlah kematiannya sebanyak 24 bayi, sedangkan jumlah kematian bayi (umur 0 - 11 bulan) sebanyak 354 bayi. Untuk kematian anak balita (umur 0-59 bulan) hanya 7 balita.

Cakupan kunjungan bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebagai berikut :

Tabel 3.21
Persentase Bayi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tahun 2024

NO	Wilayah	Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	
			ABS	%
1	2	3	4	5
1	KERINCI	4079	2769	67,88
2	MERANGIN	6597	5386	81,64
3	SAROLANGUN	6251	5586	89,36
4	BATANGHARI	5685	4221	74,25
5	MUARO JAMBI	7256	3418	47,11
6	TANJAB TIMUR	6299	5961	94,63
7	TANJAB BARAT	4196	3290	78,41
8	TEBO	6793	4800	70,66
9	BUNGO	6640	5261	79,23
10	KOTA JAMBI	10368	9701	93,57
11	KOTA SUNGAI PENUH	1610	1027	63,79
	TOTAL	65774	51420	78,18

Sumber : Seksi Kesga, Bidang Kesmas, 2024

3. Prevalensi Balita Stunting

Tabel 3.22
Prevalensi Balita Stunting Provinsi Jambi
Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024

No.	Kabupaten/Kota	2020 (SSGBI)	2021 (SSGBI)	2022 (SSGBI)	2023 (SKI)	2024 (SKI 2023)
1.	Kerinci	33,85	26,7	24,2	8,7	8,7
2.	Merangin	15,38	19,7	14,5	14,9	14,9
3.	Sarolangun	19,06	21,4	16,8	4,8	4,8
4.	Batanghari	27,32	24,5	26,6	10,1	10,1
5.	Muaro Jambi	13,51	27,2	18,6	12	12
6.	Tanjung Jabung Timur	20,05	25,6	22,5	23,7	23,7
7.	Tanjung Jabung Barat	21,81	19,8	9,9	14,1	14,1
8.	Tebo	30,13	26,2	25	22,7	22,7
9.	Bungo	27,57	22,9	15,4	13,7	13,7
10.	Kota Jambi	18,62	17,4	14	13,5	13,5
11.	Kota Sungai Penuh	25,66	25	26	4,1	4,1
	PROVINSI	21,03	22,4	18	13,5	13,5

Sumber : Seksi Kesga, Bidang Kesmas, 2024

Tahun 2020 – 2022 berdasarkan Survey Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) prevalensi balita stunting di Provinsi Jambi mengalami penurunan dan kenaikan prevalensi, yaitu tahun 2020 prevalensi sebesar 21,03%, tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 22,4%, tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 18%, tahun 2023 mengalami penurunan kembali berdasarkan SKI menjadi 13,5%, dan tahun 2024 berdasarkan SKI prevalensi stunting di provinsi jambi masih berdasarkan SKI 2023 yaitu 13,5%. Jika dilihat per kabupaten/kota prevalensi stunting tertinggi di Kabupaten Tanjung jabung timur yaitu 23,7%, diikuti oleh Kabupaten Tebo yaitu 22%, kemudian kabupaten Merangin 14,9%, Kabupaten Bungo 13,7%, dan kabupaten/kota yang lain masih di bawah prevalensi provinsi. Sedangkan Prevalensi stunting yang paling kecil adalah Kota sungai penuh yaitu 4,1%.

Prevalensi stunting pada balita ditargetkan bisa turun mencapai 14% pada tahun 2024, realisasi yang dicapai sebesar 13,5% (berdasarkan SKI, 2023). Indikator persentase balita stunting telah melebihi target yang ditetapkan dengan persentase capaian 103,7%. Jika dilihat perkembangannya dari 2021 sampai 2023 terjadi penurunan besaran masalah yang

cukup signifikan sebesar 4,5%. Target yang ingin dicapai pada tahun 2026 untuk penurunan stunting sebesar 8%.

Penurunan prevalensi stunting membutuhkan peran masyarakat dan pemerintah yang terkoordinasi, reintegrasi dan konvergen yang diwujudkan dalam 8 aksi konvergensi penurunan stunting. Sektor Kesehatan berkontribusi dalam upaya spesifik, yang mana berdasarkan kajiannya hanya bisa mengungkit perubahan sebesar 30%, sisanya harus dilakukan upaya sensitif yaitu di luar sector kesehatan yang berupa perbaikan kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kejadian stunting.

Prevalensi Wasting pada balita ditargetkan bisa diturunkan menjadi 7,8%, realisasi yang telah dicapai sebesar 6,6% (SKI, 2023). Realisasi ini telah melebihi target yang ditetapkan, dengan tingkat pencapaian 118,18%. Penurunan prevalensi wasting sama seperti penurunan stunting butuh upaya yang melibatkan semua pihak. Balita gizi kurang mendapatkan makanan tambahan untuk pemulihan selama 90 hari makan, bisa berupa makanan lokal ataupun makanan pabrikan. Balita gizi buruk 100% mendapatkan perawatan berupa rawat inap atau pun rawat jalan.

Tabel 2.17
Prevalensi Balita Stunting Provinsi Jambi
Tahun 2018, 2021, 2022, 2023 dan 2024

No.	Kabupaten/Kota	Prevalensi Wasting				
		Riskesdas 2018	SSGI 2021	SSGI 2022	SKI 2023	SKI 2024
1	Kerinci	11.52	3,8	5,4	4,7	4,7
2	Merangin	12.29	14,5	4,5	4,2	4,2
3	Sarolangun	12.60	5,7	4,7	1	1
4	Batanghari	17.03	8	6,7	6	6
5	Muaro Jambi	19.51	9,4	6,9	7,7	7,7
6	Tanjung Jabung Timur	15.90	8,5	9,7	11,2	11,2
7	Tanjung Jabung Barat	13.01	9,3	2,7	7,6	7,6
8	Tebo	7.92	7,4	7,4	7,9	7,9
9	Bungo	5.85	7,9	6,3	5,3	5,3
10	Kota Jambi	10.33	8,8	10,8	9,9	9,9
11	Kota Sungai Penuh	3.96	6,6	2,6	1,4	1,4
	PROVINSI	12.05	9,1	6,6	6,6	6,6
	INDONESIA	10,20				

Sumber : Seksi Kesga, Bidang Kesmas, 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa permasalahan stunting cenderung turun mendekati target yang diharapkan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024. Hal yang sama juga terjadi pada masalah wasting cenderung turun melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2024.

2.2.3 SASARAN Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Dalam upaya pencapaian tujuan “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat” yang sasaran kerjanya “Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Tidak Menular” dilakukan beberapa kegiatan dan program yaitu Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dengan Indikator Kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.25

Indikator Menurunkan Angka Kesakitan penyakit Menular dan Tidak Menular Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1.	Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit menular dan Tidak Menular	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%	100%	100%
		Menurunnya Angka Kesakitan Kejadian Luar Biasa (KLB)	100%	100%	100%

Sumber : Seksi Surveilans, Bidang P2P, 2024

1. Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana.

Provinsi Jambi sebagai salah satu provinsi di sumatra yang terkenal dengan iklim tropis, namun juga menjadi kerentanan terjadinya perubahan iklim seperti kenaikan temperatur , perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan, kenaikan muka air laut yang dapat mengancam daya dukung lingkungan dan kegiatan seluruh sektor pembangunan.

Berdasarkan Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2013 menyatakan bahwa 8 dari 11 Kabupaten/ Kota yang berada di Provinsi Jambi berisiko tinggi mengalami bencana, dan 3 lainnya berisiko sedang mengalami bencana. Jenis ancaman bencana yang ada di Provinsi Jambi di antaranya banjir, gempa bumi, angin puting beliung, banjir bandang, erupsi gunung berapi, tanah longsor, konflik sosial, kebakaran, kecelakaan transportasi, KLB keracunan, KLB penyakit dan yang lainnya.

Ranwal Renja Tahun 2026

Tabel 3.26
Rekapitulasi Kejadian Bencana Tahun 2023 s/d tahun 2024

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN		KET
		2023	2024	
1	2	3	4	5
1	Kebakaran Pemukiman	7	2	
2	Karhutla	-	-	
3	Angin Putting Beliung	3	-	
4	Banjir	13	10	
5	Longsor	-	-	
6	Angin Kencang	-	-	
7	Erupsi Gunung	-	-	
8	Gempa Bumi	-	-	
9	Banjir Bandang	-	-	
10	Lahar Dingin	-	-	
11	Banjir ROB	-	-	
12	Abrasi	-	-	
	JUMLAH	23	12	

Sumber : Seksi Surveilans, Bidang P2P, 2024

Pada tahun 2024 ada 2 (dua) kejadian bencana yaitu kebakaran pemukiman dan banjir. Kejadian yang paling banyak menyebabkan krisis kesehatan adalah banjir yang berdampak pada 133.453 jiwa.

Tabel 3.27
**PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK
KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA
DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2024**

NO	KABUPATEN/ KOTA	JENIS BENCANA	JUMLAH PENDUDUK YANG TERDAMPAK		JUMLAH PENDUDUK YANG TERLAYANI		TOTAL CAPAIAN	LAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN	KET
			PRA KRISIS	DARURAT KRISIS	PRA KRISIS	DARURAT KRISIS			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Kerinci	Banjir		7.808		7.808	100	Bantuan Obat-obatan, MP-ASI dan Pelayanan Kesehatan	
2	Sungai Penuh	Banjir		25.330		25.330	100	Bantuan Obat-obatan, MP-ASI dan Pelayanan Kesehatan	
3	Tebo	Banjir		6.140		6.140	100	Bantuan Obat-obatan, MP-ASI dan Pelayanan Kesehatan	
4	Muaro Jambi	Banjir		10.876		10.876	100	Bantuan Obat-obatan, MP-ASI dan Pelayanan Kesehatan	
5	Tanjung Jabung Barat	Banjir		1.001		1.001	100	Bantuan Obat-obatan, MP-ASI dan Pelayanan Kesehatan	

6	Batang Hari	Banjir		37.958		37.958	100	Bantuan Obat-obatan, MP-ASI dan Pelayanan Kesehatan	
7	Sarolangun	Banjir		2.313		2.313	100	Bantuan Obat-obatan, MP-ASI dan Pelayanan Kesehatan	
8	Kota Jambi	Banjir		36.183		36.183	100	Bantuan Obat-obatan, MP-ASI dan Pelayanan Kesehatan	
9	Bungo	Banjir		5.096		5.096	100	Bantuan Obat-obatan, MP-ASI dan Pelayanan Kesehatan	
10	Merangin	Banjir		748		748	100	Bantuan Obat-obatan, MP-ASI dan Pelayanan Kesehatan	
11	Kota Jambi	Kebakaran Pemukiman		16		16	100	Bantuan Obat-obatan, MP-ASI dan Pelayanan Kesehatan	
12	Tanjung Jabung Barat	Kebakaran Pemukiman		6		6	100	Bantuan Obat-obatan, MP-ASI dan Pelayanan Kesehatan	
TOTAL				133.475		133.475			

Sumber : Seksi Surveilans, Bidang P2, Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kejadian Krisis Kesehatan di Provinsi Jambi yang paling banyak berdampak pada masyarakat adalah bencana banjir berdampak kepada masyarakat sebanyak 133.453 jiwa, dan bencana kebakaran pemukiman berdampak pada masyarakat sebanyak 22 Jiwa.

Tabel 3.28
Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Di Provinsi Jambi Tahun 2024

Target yang Harus Dilayani	Jumlah Yang terlayani	Yang Belum Terlayani	%	Ket
133.475	133.475	0	100	

Sumber : Seksi Surveilans, Bidang P2P, 2024

Pada Tabel 3.28 di atas terlihat persentase penduduk yang terlayani akibat bencana sebesar 100% .

Tabel 3.29

**PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN BAGI ORANG YANG TERDAMPAK
DAN BERISIKO PADA SITUASI KLB PROVINSI
DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2024**

NO	KABUPATEN/ KOTA	JENIS BENCANA	JUMLAH PENDUDUK YANG TERDAMPAK		JUMLAH PENDUDUK YANG TERLAYANI		TOTAL CAPAIAN	LAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN	KET
			Berpotensi KLB	Situasi KLB	Berpotensi KLB	Situasi KLB			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Muaro Jambi	Pertusis		121		121	100	Pengobatan penderita, pemberian profilaksis pada KE, Imunisasi kejar, penyuluhan	
2	Kota Jambi	Pertusis		1.778		1.778	100	Pengobatan penderita, pemberian profilaksis pada KE, Imunisasi kejar, penyuluhan	
3	Merangin	Pertusis		26		26	100	Pengobatan penderita, pemberian profilaksis pada KE, Imunisasi kejar, penyuluhan	
4	Kota Jambi	Keracunan Pangan		1.179		1.179	100	Pengobatan penderita, pemberian profilaksis pada KE, Imunisasi kejar, penyuluhan	
5	Tebo	Keracunan Pangan		16		16	100	Pengobatan penderita, pemberian profilaksis pada KE, Imunisasi kejar, penyuluhan	
6	Tanjung Jabung Barat	Keracunan Pangan		37		37	100	Pengobatan penderita, pemberian profilaksis pada KE, Imunisasi kejar, penyuluhan	
7	Muaro Jambi, Kota Jambi	Difteri		3.221		3.221	100	Pengobatan penderita, pemberian profilaksis pada KE, Imunisasi kejar, penyuluhan	
8	Muaro Jambi	Difteri		125		125	100	Pengobatan penderita, pemberian profilaksis pada KE, Imunisasi kejar, penyuluhan	
9	Sarolangun	Difteri		131		131	100	Pengobatan penderita, pemberian profilaksis pada KE, Imunisasi kejar, penyuluhan	

Ranwal Renja Tahun 2026

10	Merangin	Tetanus Neonatorum		3		3	100	Pengobatan penderita, pemberian profilaksis pada KE, Imunisasi kejar, penyuluhan	
11	Kota Jambi	Suspek Pertusis	24		24		100	Pengobatan penderita, pemberian profilaksis pada KE, penyuluhan	
12	Tanjung Jabung Barat	Suspek Pertusis	7		7		100	Pengobatan penderita, pemberian profilaksis pada KE, penyuluhan	
13	Muaro Jambi	Suspek Pertusis	19		19		100	Pengobatan penderita, pemberian profilaksis pada KE, penyuluhan	
14	Tanjung Jabung Timur	Suspek Pertusis	8		8		100	Pengobatan penderita, pemberian profilaksis pada KE, penyuluhan	
15	Sarolangun	Suspek Pertusis	11		11		100	Pengobatan penderita, pemberian profilaksis pada KE, penyuluhan	
16	Batanghari	Suspek Pertusis	2		2		100	Pengobatan penderita, pemberian profilaksis pada KE, penyuluhan	
17	Kota Jambi	Suspek Difteri	34		34		100	Pengobatan penderita, pemberian profilaksis pada KE, penyuluhan	
18	Muaro Jambi	Suspek Difteri	50		50		100	Pengobatan penderita, pemberian profilaksis pada KE, penyuluhan	
19	Bungo	Suspek Difteri	4		4		100	Pengobatan penderita, pemberian profilaksis pada KE, penyuluhan	
TOTAL			159	6.637	159	6.637	100		

Sumber : Seksi Surveilans, Bidang P2, 2024

3.1.1. SASARAN 4 :	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan
---------------------------	--

Dalam upaya pencapaian tujuan “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat” yang sasaran kerjanya “Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan” dengan indikator sasaran Jumlah Kabupaten/Kota Sehat dengan target 6 Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian indikator 4 kabupaten/kota.

Tabel 3.36
Indikator Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan	Jumlah Kabupaten/Kota Sehat	6	4	66,6%

Kabupaten Kota Sehat (KKS) adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat & pemerintah daerah Penghargaan KKS Diberikan Kepada Kabupaten Kota Yang Dapat Memenuhi Persyaratan/Kriteria Capaian Indikator Yang Ditetapkan. Pemberian Penghargaan diberikan setiap 2 tahun sekali, dengan melalui verifikasi Provinsi kemudian diusulkan ke Tingkat nasional dengan memenuhi pra syarat yang ditentukan.

Regulasi di Indonesia terkait Kota Sehat:

- UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
- Peraturan Bersama Menkes dan Mendagri Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang pedoman penyelenggaraan KKS

Jumlah kabupaten/ kota sehat adalah Kabupaten/kota yang melaksanakan seluruh tatanan, memiliki SK Tim Pembina, Memiliki SK forum, rencana kerja dan mempunyai laporan hasil verifikasi oleh tim Pembina Provinsi. (*Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Permenkes No.21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024*)

Tahun 2024 merupakan tahun verifikasi dokumen yang dilakukan oleh pusat sebagai bentuk penilaian Kabupaten/Kota Sehat. Dokumen yang harus dilengkapi berupa capaian 9 indikator tatanan KKS dan harus memenuhi prasyarat mutlak yaitu tercapainya cakupan desa ODF sesuai standar yang ditentukan yaitu 80% untuk Padapa, 90 % untuk Wistara dan 100 % desa ODF untuk penghargaan Swastisaba Wistara. Dari 6 kabupaten kota menjadi target KKS, 4 kabupaten yang akhirnya lolos nominasi nasional dan mendapat penghargaan Swastiaba, jadi secara kinerja maka program KKS Provinsi Jambi mencapai target sebanyak 66,67%.

Kabupaten/Kota yang terverifikasi sebagai Kabupaten Kota/Sehat merupakan kabupaten Kota/Sehat dibuktikan dengan adanya SK kelembagaan dan rencana kerja dari Tim Pembina dan Forum Kabupaten Kota Sehat, serta data dukung pelaksanaan kegiatan yang dikirimkan kepada Tim Pembina Provinsi dan telah diverifikasi oleh Tim Pembina Provinsi.

Capaian ODF Kabupaten/Kota

Jumlah desa/kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) *atau Open Defecation Free* (ODF) di Provinsi Jambi sebanyak 921 desa/kelurahan terverifikasi atau sebesar 58,96% dari total 1.562 desa/kelurahan. Desa / Kelurahan terverifikasi ODF/SBS artinya desa/kelurahan tersebut telah dilakukan monitoring dan verifikasi capaian pilar 1(satu) STBM yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan. Verifikasi ODF dilaksanakan oleh tim verifikasi STBM secara benjenjang sesuai dengan capaian pilar-pilar STBM. Verifikasi ODF tingkat desa/kelurahan dilaksanakan oleh tim puskesmas/kecamatan, verifikasi ODF tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Dinkes kabupaten/kota dengan melibatkan OPD terkait dan verifikasi ODF tingkat kab/kota dilaksanakan oleh provinsi. Capaian desa/kelurahan ODF kabupaten/kota di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.37
Persentase Capaian Desa/Kelurahan ODF kabupaten/kota Provinsi Jambi
Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Desa ODF	Kategori	Keterangan
1	2	3	4
Kota Jambi	100%	Wistara	Dokumen lengkap
Kota Sungai Penuh	100%	Wistara	Dokumen lengkap
Sarolangun	100%	Wistara	Dokumen lengkap
Tebo	100	Wistara	Tidak mengirim dokumen
Muaro Jambi	81,29	Padapa	Dokumen lengkap
Batang Hari	76,61	Padapa	Tidak mengirim dokumen

Sumber : Seksi Kesling, Bidang Kesmas, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hanya 6 (enam) kabupaten/kota yang capaian Desa ODF diatas 70% dan 4 (empat) kabupaten/kota yang mengirimkan dokumen secara lengkap yang akan mengikuti penilaian untuk mendapatkan penganugrahan Swastisaba di Tingkat Nasional yaitu Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, Sarolangun dan Tebo.

Setelah melalui proses pengiriman dokumen, verifikasi dokumen secara online (daring) dan vefikasi lapangan oleh Tim KKS Pusat sampe yang dilaksanakan mulai bulan Mei s/d September tahun 2023, maka pada tanggal 28 November tahun 2023 diberikan penghargaan kepada Kabupaten/Kota yang dinyatakan lolos verifikasi dokumen dan mendapatkan penghargaan Swastisaba.

Tabel 3.38
Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Penghargaan Swastisaba Di Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Kategori Swastisaba	Pemberi penghargaan
1	2	3
Kota Jambi	Wistara	Kemenkes RI
Kota Sungai Penuh	Wiwerda	Kemenkes RI
Sarolangun	Padapa	Kemenkes RI
Muaro Jambi	Padapa	Kemenkes RI

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari 6 (enam kabupaten yang diusulkan hanya ada 4 (empat) kabupaten/kota yang mendapat penghargaan Swastisaba di tahun 2023 karena telah mengirimkan dokumen secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

Tabel 3.39
Sejarah Kabupaten/Kota Sehat di Provinsi Jambi
Tahun 2004 - 2024

No	KABUPATEN	2004	2005	2006	2007	2008	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		program	anugrah	program	anugrah	s/d 2013	program	anugrah	program	anugrah	program	anugrah	program	anugrah	program	anugrah	
1	KERINCI	✓		✓			✓	✗							✓		2
2	MERANGIN										✓				✓		1
3	SAROLANGUN						✓		✓	✗	✓				✓		2
4	DATANGHARI										✓		✓	✗	✓		1
5	MUARO JAMBI											✓		✗	✓		0
6	TANJAP TIMUR										✓						1
7	TANJAP BARAT														✓		0
8	TEBO								✓		✓		✓		✓		3
9	DUNGO										✓				✓		1
10	KOTA JAMBI						✓	✗	✓		✓		✓	✗	✓		2
11	SUNGAI PENUH						✓	✗			✓				✓		1
Jumlah.....		1	1	1	1	0	3	1	3	2	8	8	4	1	10	4	14
Keterangan																	

Dari tabel di atas di ketahui bahwa Kabupaten/Kota Sehat (KKS) di Provinsi Jambi di mulai dari tahun 2004 yang diikuti oleh kabupaten Kerinci dan meraih Swastisaba Wiwerda, tahun 2019 merupakan tahun terbanyak bagi pemerintah daerah provinsi jambi dalam memperoleh penghargaan Swasti Saba yaitu sebanyak 8 kabupaten dari 11 kabupaten yang ada. Namun pada periode penilaian berikutnya yaitu tahun 2021 dari 4 kabupaten yang mengajukan berkas, hanya 1 kabupaten yang memperoleh penghargaan yaitu Kabupaten Tebo, karena pada tahun tersebut untuk mengikuti dan memperoleh penghargaan Swastisaba ditambah dengan prasyarat mutlak yaitu Jumlah Capaian desa stop buang air besar sembarangan (SBS) . Capaian *ODF (Open Defecation Free)* sebagai prasyarat dalam pelaksanaan verifikasi KKS pada tahun ini merupakan salah satu syarat yang belum dapat dipenuhi oleh Kabupaten/Kota untuk mengikuti verifikasi KKS. Faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

- a. Kabupaten Kota Sehat (KKS) bukanlah perlombaan, tetapi upaya untuk peningkatan lingkungan yang sehat, aman, nyaman sebagai modal dasar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Kabupaten Kota Sehat (KKS) menjadi indikator program pemberdayaan masyarakat pada dinas kesehatan Provinsi Jambi, tetapi dalam pelaksanaannya tidak terintegrasi dalam pencapaian indikatornya.
- c.

3.2.5. SASARAN 5	Meningkatnya Tatakelola Manajemen Kesehatan Daerah yang didukung oleh Sistem Informasi Kesehatan
-------------------------	---

Dalam upaya pencapaian tujuan “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat” yang sasaran kinerjanya “Meningkatnya Tatakelola Manajemen Kesehatan Daerah yang didukung oleh Sistem Informasi Kesehatan” dengan Indikator Kinerja Persentase Capaian Nilai SAKIP dan Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat.

Tabel 3.40
Indikator Kinerja Persentase Capaian Nilai SAKIP Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Tatakelola Manajemen Kesehatan Daerah yang didukung oleh Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Capaian Nilai SAKIP	81,91%	82,60%	100,84%
		Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	87,41%	86,73%	99,22%

Sumber : Subbag HKU, Sekretariat, 2024

Penilaian Implementasi SAKIP Unit Kerja dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s/d 100 yang selanjutnya di berikan kategori peringkat untuk menentukan Tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan.

Nilai akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kesehatan tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2023 memperoleh nilai **81,91 kategori “A” dengan interpretasi “ Memuaskan”**

Kesimpulan dari hasil analisis pengelolaan pengaduan pelayanan publik adalah sebagai berikut :

1. Responden pada pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2024, responden terbagi dalam karakteristik jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan, dengan dominasi karakteristik adalah sebagai berikut:

No	Karakteristik	Dominasi	
		Keterangan	Persentase
1	Jenis kelamin	Perempuan	60,42%
2	Pendidikan terakhir	S1	31,25%
3	Pekerjaan	Lainnya	31,77%
4	Umur	31-40 Tahun	34,40%

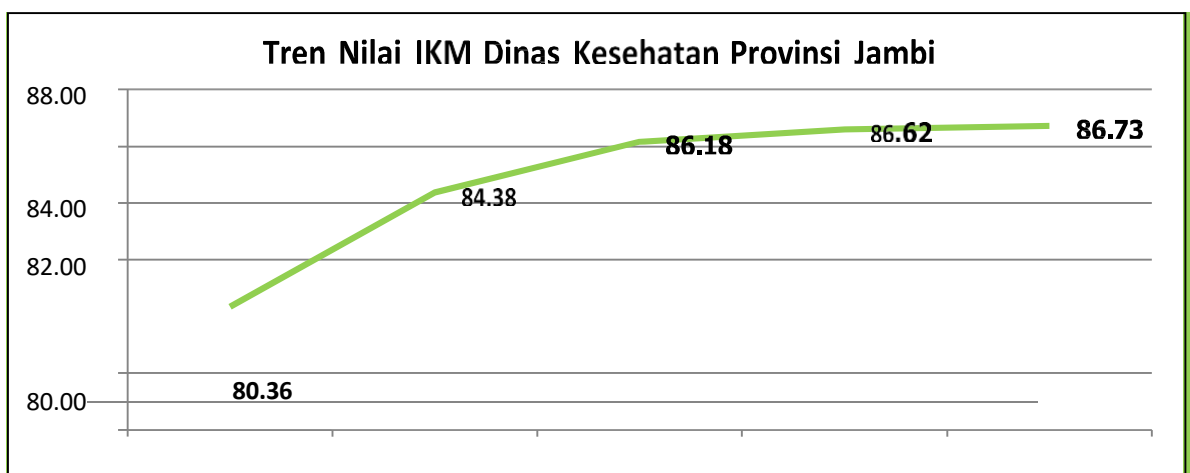
2. Hasil analisis pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NRR tertimbang	3,465
IKM	86,73
Kategori	Baik

Sedangkan untuk hasil analisis per unsur layanan adalah sebagai berikut:

No.	Ruang Lingkup	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Kategori	Peringkat	
U1	Persyaratan	3,396	84,90	Baik	B 7	
U2	Prosedur	3,443	86,07	Baik	B 5	
U3	Waktu Pelayanan	3,344	83,59	Baik	B 9	
U4	Biaya / Tarif	3,568	89,19	Sangat Baik	A 2	
U5	Produk Layanan	3,469	86,72	Baik	B 4	
U6	Kompetensi Pelaksana	3,432	85,81	Baik	B 6	
U7	Perilaku Pelaksana	3,547	88,67	Sangat Baik	A 3	
U8	Sarana dan prasarana	3,370	84,24	Baik	B 8	
U9	Penanganan Pengaduan	3,688	92,19	Sangat Baik	A 1	
Nilai IKM SKPD		86,73 "Baik/B"				

3. Jika dilihat dari tren nilai IKM hasil survei kepuasan masyarakat di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi selama 5 tahun dari tahun 2020 sampai tahun 2024 selalu meningkat. Hal itu menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Berikut tren nilai IKM Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Selama lima tahun:



Rekomendasi dari hasil analisis pengelolaan pengaduan pelayanan publik adalah sebagai berikut :

1. Survei Kepuasan Masyarakat harus tetap dilaksanakan setiap tahunnya secara berkelanjutan karena merupakan salah satu *tools* evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Dari hasil survei diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai:
 - a. Indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
 - b. Bahan untuk menetapkan kebijakan dan berbagai langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi akan ditindaklanjuti sebagai berikut:
 - a. Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik dengan melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten, terutama mempertahankan kualitas unsur layanan penanganan pengaduan, saran dan masukan yang sudah mendapat kategori sangat baik.
 - b. Tetap melaksanakan pemantuan dan evaluasi setiap unsur pelayanan sebagai dasar perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik/inovasi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
 - c. Perlu penjelasan lebih rinci mengenai SOP produk pelayanan kepada konsumen (masyarakat) sehingga konsumen tahu dengan jelas mengenai persyaratan dan waktu penyelesaian pelayanan dan tidak menganggap penyelenggaraan pelayanan dipersulit atau bertele-tele sehingga unsur waktu pelayanan yang merupakan peringkat terendah dalam penilaian dapat ditingkatkan.
 - d. Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pelayanan publik yang prima diperlukan komitmen bersama terutama komitmen dari pimpinan.
3. Arah/sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pelayanan di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi adalah selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Disisi lain penerima layanan (masyarakat) diharapkan ikut membantu dalam arti melengkapi persyaratan layanan serta tidak apatis terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas layanan

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemu kenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal.

Isu Strategis yang melingkupi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi antara lain sebagai berikut :

- a. Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama pada kelompok rentan seperti penduduk miskin, daerah tertinggal, dan terpencil.

- b. Masih terbatasnya pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar
- c. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh.
- d. Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.
- e. Belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban pembiayaan kesehatan.
- f. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, maupun sebaran sumber daya manusia kesehatan, dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan.
- g. Belum optimalnya ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat esensial, penggunaan obat yang tidak rasional, dan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas.
- h. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan, meliputi pengelolaan administrasi dan hukum kesehatan.
- i. Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan, kebijakan program dan anggaran, serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi lintas sektor.
- j. Disparitas antar wilayah, golongan pendapatan dan *urban-rural* masih terjadi, untuk ini diperlukan pendekatan pembangunan sesuai kondisi wilayah.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel T-C.31

NO	Rancangan Awal RKPD					hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Informasi Kesehatan Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Informasi Kesehatan Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		

3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	295.207.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	103.862.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	16.604.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	16.604.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	20.325.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	20.325.000	

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	18.175.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	18.175.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	139.335.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	186.599.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Ketepatan waktu penyampaian rekonsiliasi laporan keuangan Persentase ketepatan waktu penyampaian rekonsiliasi laporan keuangan	100%	45.319.159.135	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Ketepatan waktu penyampaian rekonsiliasi laporan keuangan Persentase ketepatan waktu penyampaian rekonsiliasi laporan keuangan	100%	58.560.000	DANA ALOKASI

9	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				131.361.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					UMUM (DAU)
10											
11	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	131.361.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	38.772.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
12	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				247.356.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				141.048.500	
13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	93.290.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	68.782.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
14											

15	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	15.299.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
16	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	154.066.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	56.967.500	
17	Administrasi Umum Perangkat Daerah				892.047.540	Administrasi Umum Perangkat Daerah				425.229.180	
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Telanaipura Kota Jambi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Telanaipura Kota Jambi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	28.402.315	
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Telanaipura Kota Jambi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	60.178.540	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Telanaipura Kota Jambi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.034.900	

20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	21.536.867	
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	9.435.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	10.435.000	
22	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	22.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		
23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	770.434.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	324.373.000	
24	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Telanai Pura Kota Jambi			414.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Telanai Pura Kota Jambi				

25	Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		
26											
27	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit	414.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit		
28	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Telanai Pura Kota Jambi			735.127.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Telanai Pura Kota Jambi			942.932.350	
29	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000	
30	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	606.380.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	557.576.000	

31	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	97.427.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	265.576.000	
32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	24.820.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		
33	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Telanai Pura Kota Jambi			1.777.845.960	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Telanai Pura Kota Jambi			117.780.350	
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	512.260.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	512.260.000	

35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	2 Unit	198.565.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	2 Unit		
36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	3 Unit	913.560.960	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	3 Unit	913.560.960	
37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	7 Unit	153.460.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	7 Unit	157.540.000	
38	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Telanai Pura Kota Jambi			60.515.120.148	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Telanai Pura Kota Jambi				

39	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKPRujukan, UKM dan UKMRujukan Tingkat Daerah Provinsi	Telanai Pura Kota Jambi	Persentase Standar saranadan prasarana Instalasifarmasi provinsi yg terpenuhi	100%	1.641.890.360	Penyediaan Fasilitas Pelayanan , Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKPRujukan, UKM dan UKMRujukan Tingkat DaerahProvinsi	Telanai Pura Kota Jambi	Persentase Standar saranadan prasarana Instalasifarmasi provinsi yg terpenuhiPersentase Pemenuhan SPA(Sarana, Prasarana, danAlkes) dan SDM KesehatanLaboratori um KesehatanPersentase RS milikpemerintah daerah yangmemenuhi Sarana Prasaranadan Alat (SPA) sesuaistandarPersentase FKTP yangmemenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA)sesuai standar	100%	949.318.398
----	---	-------------------------	---	------	---------------	---	-------------------------	--	------	-------------

40		Persentase Pemenuhan SPA(Sarana, Prasarana, dan Alkes) dan SDM Kesehatan Laboratorium Kesehatan	95%				95%		
41		Persentase RS milik pemerintah daerah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	80%				80%		
42		Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	70%				70%		

43	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah dokumen distribusiAlat Kesehatan, Obat, BahanHabis Pakai, Bahan MedisHabis Pakai, Vaksin,Makanan ke FasilitasKesehatan	1 Dokumen		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah dokumen distribusiAlat Kesehatan, Obat, BahanHabis Pakai, Bahan MedisHabis Pakai, Vaksin,Makanan ke FasilitasKesehatan	1 Dokumen		
44	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Obat, Bahan HabisPakai, Bahan Medis HabisPakai, Vaksin, Makanan danMinuman di FasilitasKesehatan yang disediakan	1 Paket	1.465.967.400	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Obat, Bahan HabisPakai, Bahan Medis HabisPakai, Vaksin, Makanan danMinuman di FasilitasKesehatan yang disediakan	1 Paket	949.318.398	

45	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Telanai Pura Kota Jambi	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencanaJumlah Kab/Kota yang memiliki 20% Puskesmas rujukan Rabies CenterJumlah kabupaten/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria <1%Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampuyang diintegrasikan sebagai Peserta JKN KISJumlah Peserta Penerima			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Telanai Pura Kota Jambi	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencanaJumlah Kab/Kota yang memiliki 20% Puskesmas rujukan Rabies CenterJumlah kabupaten/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria <1%Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampuyang diintegrasikan sebagai Peserta JKN KISJumlah Peserta Penerima			
46											

47										
48		Telanai Pura Kota Jambi	Bantuan luran (PBI) Jaminan Kesehatan (PBI-JK)mendapat kontribusi dariPemerintah Provinsi				Telanai Pura Kota Jambi	Bantuan luran (PBI) Jaminan Kesehatan (PBI-JK)mendapat kontribusi dariPemerintah Provinsi		
50		Telanai Pura Kota Jambi	Persentase Balita BeratBadan Kurang (BB/U)Persentase Kab/Kota dengan cakupan D/S minimal 70%Persentase Kab/Kota dengan				Telanai Pura Kota Jambi	mendapat kontribusi dariPemerintah ProvinsiPersentase Balita BeratBadan Kurang (BB/U)Persentase Kab/Kota dengan cakupan D/S minimal 70%Persentase Kab/Kota dengan		

51	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	600 Orang	850.500.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	600 Orang	320.133.200	
52	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	226 Orang	728.100.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	226 Orang	380.101.000	
53	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	9 Dokumen	1.697.006.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	9 Dokumen	250.000.200	

54	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	1.450.085.100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	1.280.000.000	
55	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	38.108.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	28.105.000	
56	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	50.156.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	156.996.000	
57	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	195.517.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	84.999.978	
58											
59	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11 Dokumen	1.431.318.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11 Dokumen	7.150.003.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)

60	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	135.808.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		DANA ALOKASI UMUM (DAU)
61	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	124.090.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen		DANA ALOKASI UMUM (DAU)
62	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis	145 Orang	154.170.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis	145 Orang	25.000.000	
63	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4 Dokumen	50.150.237.688	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4 Dokumen	55.035.587.545	

64	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	259.987.000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	60.000.000	
65	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	5 Dokumen	201.568.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	5 Dokumen	656.635.930	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
66	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Telanaipura Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	7 Dokumen	785.880.000	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Telanaipura Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	7 Dokumen	620.130.200	

67	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	11 Unit	39.420.000	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	11 Unit		
68	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12 Dokumen	79.740.000	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12 Dokumen		
69	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	26.292.000	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket		

70	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Telanai Pura Kota Jambi			38.520.000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Telanai Pura Kota Jambi				
71	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	38.520.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	56.664.000	
72	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Telanai Pura Kota Jambi			436.727.000	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Telanai Pura Kota Jambi				
73	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	11 Unit	40.020.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	11 Unit	65.000.100	

74	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	38 Unit	263.797.000	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	38 Unit		
75	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	36 Unit	132.910.000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	36 Unit		
76	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Telanai Pura Kota Jambi			210.734.000,0	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Telanai Pura Kota Jambi				
77	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Telanai Pura Kota Jambi	Persentase Pemenuhan kebutuhan SDM di Fasyankes sesuai standar	50%	82.304.000	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Telanai Pura Kota Jambi	Persentase Pemenuhan kebutuhan SDM di Fasyankes sesuai standar	50%		

78	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	23097.30 885 Orang	82.304.000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	23097.3088 5 Orang	68.600.200	
79	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	273 Orang		Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	273 Orang	20.716.600	

80	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Telanai Pura Kota Jambi	Persentase Tenaga Kesehatan yang mendapatkan pelatihan terstandar Akreditasi layanan Pendidikan dan Pelatihan yang memenuhi standar pelatihan Persentase SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	0% 0 Klasifikasi 100 %	128.430.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Telanai Pura Kota Jambi	Persentase Tenaga Kesehatan yang mendapatkan pelatihan terstandar Akreditasi layanan Pendidikan dan Pelatihan yang memenuhi standar pelatihan Persentase SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	0% 0 Klasifikasi 100 %		
81	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	11 Dokumen	128.430.000	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	11 Dokumen	20.683.000	

82	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Telanai Pura Kota Jambi			234.720.000	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Telanai Pura Kota Jambi				
83	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Telanai Pura Kota Jambi	Persentase Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang memenuhi ketentuan perizinan Persentase pedagang besar farmasi (PBF) yang memenuhi ketentuan perizinan Persentase pedagang besar farmasi (PBF) yang memenuhi ketentuan perizinan	100 % 100 %100 %	128.148.000	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Telanai Pura Kota Jambi	Persentase Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang memenuhi ketentuan perizinan Persentase pedagang besar farmasi (PBF) yang memenuhi ketentuan perizinan Persentase pedagang besar farmasi (PBF) yang memenuhi ketentuan perizinan	100 % 100 %100 %	12.706.448	

84	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanjutan Penerbitan Perizinan	44 Sarana	128.148.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanjutan Penerbitan Perizinan	44 Sarana		
85	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Telanai Pura Kota Jambi			106.572.000	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Telanai Pura Kota Jambi				

86	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjutan Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	44 Sarana	106.572.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjutan Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	44 Sarana	60.000.060	
87	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Telanai Pura Kota Jambi			773.069.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Telanai Pura Kota Jambi				
88	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	3 Dokumen	363.958.000	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	3 Dokumen	815.602.271	

89	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Telanai Pura Kota Jambi			194.385.000	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Telanai Pura Kota Jambi				
90	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	194.385.000	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	114.887.500	
91	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Telanai Pura Kota Jambi				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Telanai Pura Kota Jambi				

92	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	3 Dokumen	214.726.000	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	3 Dokumen		DANA ALOKASI UMUM (DAU)
93	BALAI PELATIHAN KESEHATAN	Telanai Pura Kota Jambi				BALAI PELATIHAN KESEHATAN	Telanai Pura Kota Jambi				
94	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab. Muaro Jambi, Jambi Luar Kota, Pijaoan			1.368.789.602	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab. Muaro Jambi, Jambi Luar Kota, Pijaoan				
95	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				220.560.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				58.560.000	
96	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	220.560.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	58.560.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
97	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Telanai Pura Kota Jambi			164.782.082	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Telanai Pura Kota Jambi				

98	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	28.402.315	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	28.402.315	
99	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.034.900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.034.900	
100	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	21.536.867	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	21.536.867	
101	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	102.808.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	102.808.000	
102	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Telanai Pura Kota Jambi			57.230.900	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Telanai Pura Kota Jambi				

103	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	57.230.900	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	87.574.900
104	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Telanai Pura Kota Jambi			416.940.320	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Telanai Pura Kota Jambi			
105	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.700.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.700.000
106	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	388.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	388.200.000

107	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	26.040.320	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	26.040.320	
108	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Telanai Pura Kota Jambi			509.276.300	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Telanai Pura Kota Jambi				
109	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	83.240.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	83.240.000	
110	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	271.920.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		

111	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	154.116.300	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	154.116.300	
112	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Telanai Pura Kota Jambi			521.042.050	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Telanai Pura Kota Jambi				
113	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Telanai Pura Kota Jambi			521.042.250	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Telanai Pura Kota Jambi				
114	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	900 Orang	521.042.050	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	900 Orang	521.735.850	

115	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	Telanai Pura Kota Jambi				BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	Telanai Pura Kota Jambi				
116	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Telanai Pura Kota Jambi			366.515.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Telanai Pura Kota Jambi				
117	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Telanai Pura Kota Jambi			319.800.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Telanai Pura Kota Jambi				
118	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	319.800.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	177.000.000	
119	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Telanai Pura Kota Jambi			319.800.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Telanai Pura Kota Jambi				

120	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.400.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.118.370	
121	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.800.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	37.330.000	
122	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30.600.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	
123	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	197.380.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	47.304.000	
124	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Telanai Pura Kota Jambi			204.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Telanai Pura Kota Jambi				

125	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	204.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	34.556.000	
126	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Telanai Pura Kota Jambi	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		442.620.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Telanai Pura Kota Jambi	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		354.000.000	
127	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	385.020.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	354.000.000	
128	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	57.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	41.863.147	

129	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Telanai Pura Kota Jambi			210.915.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Telanai Pura Kota Jambi				
130	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	112.440.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	41.863.147	
131	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	98.475.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	53.500.000	
132	Peningkatan Pelayanan BLUD	Telanai Pura Kota Jambi			1.900.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	Telanai Pura Kota Jambi				

133	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	7 Unit Kerja	1.900.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Telanai Pura Kota Jambi	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	7 Unit Kerja	1.900.000.000	
134	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Telanai Pura Kota Jambi			3.253.183.420	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Telanai Pura Kota Jambi				
135	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Telanai Pura Kota Jambi			2.040.000.000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Telanai Pura Kota Jambi				
136	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	2.040.000.000	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit		

137	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				1.213.183.420	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				
138	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	1.213.183.420	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	704.414.483

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kesehatan Provinsi Jambi memiliki 5 Program, 19 Kegiatan dan 105 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran yang diterima oleh dinas Kesehatan Provinsi Jambi setelah APBD Perubahan yang bersumber dari APBD sebesar Rp.137.336.760.853,- terdiri dari Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2023 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan masyarakat, dan Untuk mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja Program dan Kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. pada Tahun 2023 Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2023 telah melaksanakan Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan / kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

1. Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas. Dilihat dari aspek penganggaran Terjadi keterlambatan Juknis DAK Non Fisik. Juknis tersebut baru keluar pada bulan Mei sehingga kegiatan baru dapat dilaksanakan pada Bulan Juli 2023. Dari aspek kegiatan Ada Pembayaran Premi PBI JKN terdapat sisa yang cukup besar oleh karena penetapan peserta PBI di awal tahun terjadi pengurangan sehingga ada selisih antara jumlah peserta PBI yang di anggarkan dengan PBI yang di tetapkan di awal tahun dan Terdapat sisa Kontrak yang cukup besar terutama pada lelang Fisik.

Secara umum pencapaian target kinerja tidak mengalami kendala yang signifikan. Permasalahn indicator kinerja yang tidak mencapai target antara lain Penurunan Jumlah Kematian Ibu dari yang ditargetkan 59 tetapi jumlah kematian meningkat menjadi 72 orang hal ini disebabkan masih tingginya bumil resti yang terlambat mendapat penanganan ketika dirujuk ke rumah sakit. Indikator ke dua yang tidak mencapai terget adalah Prevalensi Balita Stunting yang ditargetkan turun mencapai 16% tetapi realisasi sebesar 18%, salah satu penyebabnya adalah penanganan stunting melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita kurus dan Bumil KEK tidak dapat terlaksana oleh karena ada surat dari Kementerian Keuangan untuk henti salur (KMK Nomor : 24/KM.7/2022). Indikator ke tiga yang tidak mencapai target adalah Persentase kabupaten/kota sehat, hal ini disebabkan kriteria untuk kabupaten/kota sehat minimal 80% desa/kelurahan ODF, sedangkan provinsi jambi yang capaian ODF minimal 80% hanya 4 kabupaten/kota.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan rencana tindaklanjut sebagai berikut:

- Terus melakukan konsolidasi internal dan eksternal baik dengan pemerintah pusat, daerah maupun kabupaten/kota dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya terutama terhadap indikator yang belum mencapai target
- Meningkatkan peran serta masyarakat dan lintas sektor terkait dalam rangka meningkatkan akses dan kuitas pelayanan kesehatan.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan upaya pelayanan kesehatan masyarakat secara berkesinambungan dan berkala.
- Penguatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
- Peningkatan kualitas data kesehatan melalui verifikasi dan validasi data kesehatan secara berjenjang melalui umpan balik terkait kelengkapan dan ketepatan waktu pengiriman data kesehatan

BAB III

TUJUAN DAN SARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”. RKP 2025 ini diproyeksikan sebagai respons atas perubahan global sekaligus pemenuhan mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Arah kebijakan kesehatan diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Kementerian PPN/Bappenas berharap RKP 2025 memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi sebagaimana yang termuat di dalam Rancangan Undang-Undang RPJPN 2025–2045 dengan rumusan visi Indonesia Emas 2045, yaitu negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. “Kick off penyusunan RKP 2025 ini diharapkan bisa menjadi pengingat bagi kita agar penyusunan prioritas pembangunan 2025 dapat berfokus pada pencapaian tema dan sasaran pembangunan RKP.”

Arah Kebijakan Kesehatan Nasional diketahui akan membawa penyelenggaraan kesehatan nasional menuju pada cakupan kesehatan semesta dengan akses dan mutu layanan yang prima, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar, serta mendorong adanya peningkatan upaya promotif dan preventif dengan memanfaatkan teknologi. Arah kebijakan Kementerian Kesehatan hingga 2025 merupakan penjabaran lebih lanjut dari arah kebijakan nasional tersebut dengan memperhatikan lingkungan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Arah kebijakan Kementerian Kesehatan menggambarkan perubahan cara dan lingkup kerja kementerian ke depan yang akan memasuki situasi penuh ketidakpastian dan dinamika, baik dalam bidang kesehatan maupun bidang lainnya yang mempengaruhi kesehatan. Perubahan tersebut dikonsepsikan sebagai Transformasi Kesehatan yang mencakup penguatan kontribusi Kementerian Kesehatan dalam perwujudan pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang lebih baik, sistem ketahanan kesehatan, 24 penyediaan SDM kesehatan yang berkualitas dan merata, perluasan cakupan sistem pembiayaan, serta digitalisasi pada sistem pelayanan kesehatan. Arah kebijakan Kementerian Kesehatan kemudian dirumuskan dan/atau ditetapkan sejalan dengan transformasi kesehatan yang menjadi jiwa dari perubahan Renstra ini, yaitu dengan rumusan: “Menguatkan sistem kesehatan dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta,

dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar, melalui penyediaan pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang berkualitas, sistem ketahanan kesehatan yang tangguh, SDM kesehatan yang kompeten, sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi". Dalam rangka menjalankan kebijakan di atas, maka strategi Kementerian Kesehatan hingga 2024 dirumuskan sebagai berikut: a. Transformasi pelayanan kesehatan primer menuju penguatan dan peningkatan pelayanan yang lebih berkualitas; b. Transformasi pelayanan kesehatan rujukan dalam rangka penyediaan layanan rujukan yang lebih berkualitas; c. Transformasi menuju ke sistem ketahanan kesehatan yang tangguh definisi sistem ketahanan kesehatan yang Tangguh; d. Transformasi pembiayaan kesehatan dilakukan untuk menuju pembiayaan kesehatan yang lebih terintegrasi untuk mewujudkan ketersediaan, kecukupan, keberlanjutan, keadilan serta efektivitas dan efisiensi pada penyelenggaraan pembiayaan; e. Transformasi SDM kesehatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan yang kompeten, merata serta berkeadilan, sehingga tidak ada lagi puskesmas yang tanpa dokter, serta ada peningkatan yang signifikan dari persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar dan persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 (empat) dokter spesialis dasar dan 3 (tiga) dokter spesialis lainnya.

Badan Perencanaan Daerah akan berfokus pada penguatan gerakan masyarakat hidup sehat, dengan penyediaan air bersih, sanitasi, dan cuci tangan pakai sabun, mendukung kawasan yang sehat. Fokus lainnya pada Rencana Kerja Pemerintah 2025, yaitu penguatan **health security** atau keamanan kesehatan. **Bertujuan (tiba2 ada tujuan, tujuan dari apa/siapa)** untuk penguatan kemampuan untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon terhadap penyakit-penyakit berbahaya, terutama penyakit yang berasal dari **luarnegeri.Sistem** peningkatan ini oleh sistem **surveillance** [pengawasan] penyakit secara **real time**, kapasitas dan jejaring laboratorium, kapasitas sumber daya manusia, **protokol, dan tata laksana respon cepat, dan** penguatan untuk kesehatan dalam RKP 2024, juga akan memfokuskan penguatan fasilitas farmasi, alat kesehatan dan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Serta ketersediaan vaksin dan obat terutama untuk TB dan pneumonia, **serta HIV.Jadi** di sini memenuhi fasilitas alat kesehatan sesuai kelas rumah sakit dan rujukan. **Kemudian/selanjutnya** pemenuhan dokter dan 9 jenis tenaga kesehatan di puskesmas, **terutama di daerah Timur** (hubungannya dengan Jambi), karena banyak sekali puskesmasnya tidak lengkap jenis tenaga kesehatannya. Juga insentif bagi industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri dan pengelolaan limbah medis.

Adapun kegiatan prioritas dan proyek prioritas pada program prioritas peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi
2. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
3. Peningkatan Pengendalian Penyakit
4. Penguatan Germas
5. Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan

Dokumen RKP Tahun 2025 memuat hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP 2025, rancangan ekonomi makro, arah pengembangan wilayah, pendanaan pembangunan, prioritas pembangunan nasional, pembangunan bidang, serta kaidah pelaksanaan. Dan tema dari RKP tahun 2025.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 disusun sebagai pedoman pelaksanaan bagi pemerintah pusat dan daerah yang berbasis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Pada Pemerintah Pusat, RKP Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, yang kemudian dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) 2025.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, disebutkan bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2025` mengacu pada Penetapan Tujuan dan Sasaran Rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2022-2026.

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu Strategis Daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan pada bidang kesehatan “Misi ke-3 **Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia.**

Tujuan: meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yg terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender. Sasarannya meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Untuk mencapai misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender dilaksanakan prioritas utama yaitu : membangun sumber daya manusia yang berdaya saing, ditandai oleh penduduk laki-laki dan perempuan yang memiliki tingkat pendidikan dan

derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik serta adil dalam kerangka masyarakat yang berbudaya dan agamis.

Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan, dengan tujuan, sasaran sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Menurunkan Kematian Ibu, Bayi dan Stunting	Jumlah kematian Bayi / KH	353	343	333	323	313	303
			Jumlah kematian ibu / KH	62	59	56	53	52	47
			Prevalensi stunting	21,03	16	14	12	10	8
			Prevalensi wasting	10,2	7,8	7,5	7,3	7	6,8
			Jumlah Kabupaten/Kota Sehat	4	6	6	8	8	9
		Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC	93%	96%	96%	96%	96%	96%
			Persentase orang dengan HIV/AIDS yang menjalani terapi ARV (ODHA On ART)	21%	45%	50%	55%	60%	65%
			Jumlah kabupaten /kota mencapai eliminasi malaria	7	9	9	9	9	10
			Persentase bayi pada usia 0-11 bulan yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	92%	95%	95%	95%	95%	95%

		Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terakreditasi	88	100	100	100	100	100
			Persentase Layanan Laboratorium rujukan spesimen, IPTEK dan SDM Laboratorium se Provinsi Jambi	63	73	82	91	100	100
			Jumlah kepesertaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang ditanggung oleh pemerintah provinsi Jambi (jiwa)	76.086	76.586	77.086	77.586	78.086	78.086
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan	Persentase puskesmas lengkap 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	38%	40%	43%	46%	48%	50%
			Persentase RSUD Kabupaten/Kota Kelas C yang memiliki 7 Dokter Spesialis lengkap	93	95	96	97	98	100
			Persentase Puskesmas Tanpa Dokter	30	20	15	10	5	0
			Persentase Tenaga Kesehatan yang mendapatkan pelatihan terstandar	50	53	58	65	72	78
			Persentase usaha kecil obat tradisional (UKOT) yang memenuhi ketentuan perizinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase pedagang besar farmasi (PBF) yang memenuhi ketentuan perizinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatkan Tata Kelola Manajemen Kesehatan Daerah yang Didukung Oleh Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Capaian Nilai SAKIP	71	75	77	80	83	85
			Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	82	83	84	85	86	87

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi.

Berikut adalah program, kegiatan dan subkegiatan di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang akan dilaksanakan pada periode 2025-2029 :

4.1.1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- a. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Provinsi
 1. Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
 2. Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 3. Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
 4. Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
 5. Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 6. Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
 7. Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 8. Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar
 9. Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi Sesuai Standar
 10. Subkegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan
 11. Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ODMK
 12. Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan Napza
 13. Subkegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
 14. Subkegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan

- b. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Provinsi
 1. Subkegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 2. Subkegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
 3. Subkegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
 4. Subkegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
 5. Subkegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

- c. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
 - 1. Subkegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
- d. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
 - 1. Subkegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
 - 2. Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

4.1.2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

- a. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
 - 1. Subkegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- b. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
 - 1. Subkegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 2. Subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

4.1.3 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

- a. Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
 - 1. Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
- b. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
 - 1. Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional

4.1.4 Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan

- a. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
 - 1. Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
- b. Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
 - 1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi
 - 1. Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM

4.1.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Pelaksanaan Penatalaksanaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik SKPD
 2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 5. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 7. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 4. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
 5. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerUndang-Undangan

- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3. Pengadaan Mebel
 - 4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2. Penyediaan jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Labkes)
 - 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- i. Peningkatan Pelayanan BLUD
 - 1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Labkes)

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Provinsi Jambi

Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Jambi Telanaipura	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Informasi Kesehatan Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	295.207.000

4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	16.604.000
5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	20.325.000

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	18.175.000
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	139.335.000
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Jambi Telanaipura	Persentase Ketepatan waktu penyampaian rekonsiliasi laporan keuangan Persentase ketepatan waktu penyampaian rekonsiliasi laporan keuangan	100%	45.319.159.135
9	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Jambi Telanaipura			131.361.000

10		Kota Jambi Telanaipura			
11	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	131.361.000
12	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Jambi Telanaipura			247.356.000
13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	93.290.000
14		Kota Jambi Telanaipura			
15	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	

16	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Orang yangMengikuti Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-Undangan	25 Orang	154.066.000
17	Administrasi UmumPerangkat Daerah	Kota Jambi Telanaipura			892.047.540
18	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan	1 Paket	10.000.000
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan	1 Paket	60.178.540
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan	15 Paket	20.000.000
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan	4 Dokumen	9.435.000

22	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu	12 Laporan	22.000.000
23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD	12 Laporan	770.434.000
24	Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang	Kota Jambi Telanaipura			414.000.000
25	Urusan Pemerintah DaerahPengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Unit Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDisediakan	5 Unit	
26		Kota Jambi Telanaipura			
27	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Unit Sarana danPrasarana PendukungGedung Kantor atauBangunan Lainnya yangDisediakan	11 Unit	414.000.000

28	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi Telanaipura			735.127.400
29	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.500.000
30	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	606.380.000
31	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	97.427.000
32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	24.820.400
33	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi Telanaipura			1.777.845.960

34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	512.260.000
35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	198.565.000
36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	913.560.960
37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	153.460.000

38	PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT	Kota Jambi Telanaipura			60.515.120.148
39	Penyediaan FasilitasPelayanan, Sarana,Prasarana dan AlatKesehatan untuk UKPRujukan, UKM dan UKMRujukan Tingkat DaerahProvinsi	Kota Jambi Telanaipura	Persentase Standar saranadan prasarana Instalasifarmasi provinsi yg terpenuhi	100%	1.641.890.360
40		Kota Jambi Telanaipura	Persentase Pemenuhan SPA(Sarana, Prasarana, danAlkes) dan SDM KesehatanLaboratorium Kesehatan	95%	
41		Kota Jambi Telanaipura	Persentase RS milikpemerintah daerah yangmemenuhi Sarana Prasaranadan Alat (SPA) sesuaistandar	80%	

42		Kota Jambi Telanaipura	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	70%	
43	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Dokumen	
44	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1.465.967.400

45	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKPRujukan, UKM dan UKMRujukan Tingkat DaerahProvinsi	Kota Jambi Telanaipura	<p>Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana</p> <p>Jumlah Kab/Kota yang memiliki "e 20 % Puskesmas rujukan Rabies Center</p> <p>Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria <1%</p> <p>Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu yang diintegrasikan sebagai Peserta JKN KIS</p> <p>Jumlah Peserta Penerima</p>		
46		Kota Jambi Telanaipura			

47		Kota Jambi Telanaipura			
48		Kota Jambi Telanaipura	Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (PBI-JK) mendapat kontribusi dari Pemerintah Provinsi		
50		Kota Jambi Telanaipura	Persentase Balita Berat Badan Kurang (BB/U) Persentase Kab/Kota dengan cakupan D/S minimal 70% Persentase Kab/Kota dengan		
51	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	600 Orang	850.500.000

52	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	226 Orang	728.100.000
53	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	9 Dokumen	1.697.006.000
54	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	1.450.085.100
55	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	38.108.000
56	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	50.156.000

57	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	195.517.000
58		Kota Jambi Telanaipura			
59	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11 Dokumen	1.431.318.000
60	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	135.808.000
61	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	124.090.000

62	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis	145 Orang	154.170.000
63	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4 Dokumen	50.150.237.688
64	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	259.987.000
65	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	5 Dokumen	201.568.000
66	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	7 Dokumen	785.880.000

67	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	11 Unit	39.420.000
68	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12 Dokumen	79.740.000
69	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	26.292.000

70	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Kota Jambi Telanaipura			38.520.000
71	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	38.520.000
72	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Jambi Telanaipura			436.727.000
73	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	11 Unit	40.020.000
74	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	38 Unit	263.797.000

75	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	36 Unit	132.910.000
76	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kota Jambi Telanaipura			210.734.000,0
77	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Kota Jambi Telanaipura	Persentase Pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan di Fasyankes sesuai standar	50%	82.304.000
78	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	23097.30885 Orang	82.304.000

79	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	273 Orang	
80	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Jambi Telanaipura	Persentase Tenaga Kesehatan yang mendapatkan pelatihan terstandar Akreditasi layanan Pendidikan dan Pelatihan yang memenuhi standar pelatihan Persentase SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	0% 0 Klasifikasi 100 %	128.430.000
81	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	11 Dokumen	128.430.000

82	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Kota Jambi Telanaipura			234.720.000
83	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Kota Jambi Telanaipura	Persentase Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang memenuhi ketentuan perizinan Persentase pedagang besar farmasi (PBF) yang memenuhi ketentuan perizinan Persentase pedagang besar farmasi (PBF) yang memenuhi ketentuan perizinan	100 % 100 %100 %	128.148.000

84	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	44 Sarana	128.148.000
85	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Kota Jambi Telanaipura			106.572.000

86	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjutan Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	44 Sarana	106.572.000
87	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kota Jambi Telanaipura			773.069.000
88	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	3 Dokumen	363.958.000

89	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Kota Jambi Telanaipura			194.385.000
90	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	194.385.000
91	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Kota Jambi Telanaipura			

92	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	3 Dokumen	214.726.000
93	BALAI PELATIHAN KESEHATAN	Kota Jambi Telanaipura			
94	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Jambi Telanaipura			1.368.789.602
95	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Jambi Telanaipura			220.560.000
96	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	220.560.000
97	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Jambi Telanaipura			164.782.082

98	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	28.402.315
99	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.034.900
100	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	21.536.867
101	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	102.808.000
102	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Jambi Telanaipura			57.230.900

103	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	57.230.900
104	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi Telanaipura			416.940.320
105	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.700.000
106	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	388.200.000
107	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	26.040.320

108	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi Telanaipura			509.276.300
109	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	83.240.000
110	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	271.920.000
111	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	154.116.300

112	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kota Jambi Telanaipura			521.042.050
113	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Jambi Telanaipura			521.042.250
114	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	900 Orang	521.042.050
115	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	Kota Jambi Telanaipura			
116	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Jambi Telanaipura			366.515.000
117	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Jambi Telanaipura			319.800.000

118	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	319.800.000
119	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Jambi Telanaipura			319.800.000
120	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.400.000
121	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.800.000
122	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30.600.000

123	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	197.380.000
124	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Jambi Telanaipura			204.000.000
125	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	204.000.000
126	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi Telanaipura	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		442.620.000
127	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	385.020.000

128	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	57.600.000
129	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi Telanaipura			210.915.000
130	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	112.440.000
131	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	98.475.000
132	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Jambi Telanaipura			1.900.000.000

133	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	7 Unit Kerja	1.900.000.000
134	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Jambi Telanaipura			3.253.183.420
135	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Jambi Telanaipura			2.040.000.000
136	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	2.040.000.000

137	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Jambi Telanaipura			1.213.183.420
138	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kota Jambi Telanaipura	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	1.213.183.420

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)		RENCANA TAHUN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
				2026					Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
1 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Informasi Kesehatan Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Kota Jambi Telanaipura	100%	489.646.000			100%	556.420.612
1 02 01 1.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kota Jambi Telanaipura	4 Dokumen	295.207.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 Dokumen	332.886.312

1	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Jambi Telanaipura	2 Dokumen	16.604.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Dokumen	18.264.400	
1	02	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Jambi Telanaipura	2 Dokumen	20.325.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Dokumen	22.357.500	
1	02	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Kota Jambi Telanaipura	3 Laporan	18.175.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		3 Laporan	19.992.500	
1	02	01	1.01	0005	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	Kota Jambi Telanaipura	9 Laporan	139.335.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		9 Laporan	162.919.900	
1	02	01	1.01	0006	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan waktu penyampaian rekonsiliasi laporan keuangan Persentase ketepatan waktu penyampaian rekonsiliasi laporan keuangan	100%	Kota Jambi Telanaipura	100%	45.319.159.135	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	50.247.680.698	
1	02	01	1.01	0007	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Kota Jambi Telanaipura				Dana Alokasi Umum (DAU)			52.015.150

1	01	01	1.02					Kota Jambi Telanaip ura											
1	02	01	1.02	0001	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kota Jambi Telanaip ura	2 Laporan			PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Laporan					45.000.000
1	02	01	1.02	0003	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Kota Jambi Telanaip ura				Dana Alokasi Umum (DAU)							62.387.820
1	02	01	1.02	0003	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	Kota Jambi Telanaip ura	3 Orang			Dana Alokasi Umum (DAU)		3 Orang					-
1	02	01	1.02	0003				Kota Jambi Telanaip ura				Dana Alokasi Umum (DAU)							-
1	02	01	1.02	0005	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	Kota Jambi Telanaip ura	30 Orang			Dana Alokasi Umum (DAU)		30 Orang					-
1	02	01	1.02	0006	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	Kota Jambi Telanaip ura	25 Orang			Dana Alokasi Umum (DAU)		25 Orang					20.000
1	01	01	1.03		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Kota Jambi Telanaip ura											-
1	02	01	1.03	0004	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Jambi Telanaip ura	1 Paket			Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Paket					-
1	01	01	1.05		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	Kota Jambi Telanaip ura	1 Paket					1 Paket					670.000

Ranwal Renja Tahun 2026

					yang Disediakan								
1	02	01	1.05	0002	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	Kota Jambi Telanaipura	15 Paket		Dana Alokasi Umum (DAU)	15 Paket	670.000
1	02	01	1.05	0009	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Kota Jambi Telanaipura	4 Dokumen		Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Dokumen	-
1	02	01	1.05	0010	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Jambi Telanaipura	12 Laporan		Dana Alokasi Umum (DAU)	12 Laporan	-
1	02	01	1.05	0011	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Jambi Telanaipura	12 Laporan		Dana Alokasi Umum (DAU)	12 Laporan	-
1	01	01	1.06		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang			Kota Jambi Telanaipura					
1	02	01	1.06	0001	Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Jambi Telanaipura	5 Unit		Dana Alokasi Umum (DAU)	5 Unit	
1	02	01	1.06	0001				Kota Jambi Telanaipura			Dana Alokasi Umum (DAU)		
1	02	01	1.06	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit	Kota Jambi Telanaipura	11 Unit		Dana Alokasi Umum (DAU)	11 Unit	
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kota Jambi Telanaipura			Dana Alokasi Umum (DAU)		
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Jambi Telanaipura	12 Laporan		Dana Alokasi Umum (DAU)	12 Laporan	

1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Jambi Telanaipura	12 Laporan		Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Jambi Telanaipura	12 Laporan		Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Jambi Telanaipura	12 Laporan		Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	
1	02	01	1.06	0005	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kota Jambi Telanaipura			Dana Alokasi Umum (DAU)			
1	02	01	1.06	0006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	Kota Jambi Telanaipura	13 Unit		Dana Alokasi Umum (DAU)		13 Unit	
1	02	01	1.06	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Jambi Telanaipura	2 Unit		Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Unit	
1	02	01	1.06	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Jambi Telanaipura	3 Unit		Dana Alokasi Umum (DAU)		3 Unit	
1	02	01	1.06	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	Kota Jambi Telanaipura	7 Unit		Dana Alokasi Umum (DAU)		7 Unit	

1	01	01	1.07		PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYA RAKAT			Kota Jambi Telanaipura					
1	02	01	1.07	0001	Penyediaan FasilitasPelayanan, Sarana,Prasarana dan AlatKesehatan untuk UKPRujukan, UKM dan UKMRujukan Tingkat DaerahProvinsi	Persentase Standar saranadan prasarana Instalasifarmasi provinsi yg terpenuhi	100%	Kota Jambi Telanaipura	100%		Dana Alokasi Umum (DAU)		100%
1	02	01	1.07	0002		Persentase Pemenuhan SPA(Sarana, Prasarana, danAlkes) dan SDM KesehatanLaboratorium Kesehatan	95%	Kota Jambi Telanaipura	95%		Dana Alokasi Umum (DAU)		95%
1	02	01	1.07	0005		Persentase RS milikpemerintah daerah yangmemenuhi Sarana Prasaranadan Alat (SPA) sesuaistandar	80%	Kota Jambi Telanaipura	80%		Dana Alokasi Umum (DAU)		80%
1	02	01	1.07	0009		Persentase FKTP yangmemenuhi Sarana,Prasarana dan Alat (SPA)sesuai standar	70%	Kota Jambi Telanaipura	70%		Dana Alokasi Umum (DAU)		70%
1	02	01	1.07	0010	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusiAlat Kesehatan, Obat, BahanHabis Pakai, Bahan MedisHabis Pakai, Vaksin,Makanan ke FasilitasKesehatan	1 Dokumen	Kota Jambi Telanaipura	1 Dokumen		Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen
1	02	01	1.07	0010	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan HabisPakai, Bahan Medis HabisPakai, Vaksin, Makanan danMinuman di FasilitasKesehatan yang disediakan	1 Paket	Kota Jambi Telanaipura	1 Paket		Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Paket

1	02	01	1.07	0010	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKPRujukan, UKM dan UKMRujukan Tingkat DaerahProvinsi	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Jumlah Kab/Kota yang memiliki "e 2 0 % P u s k e s m a srujukan Rabies Center Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria <1% Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampuyang diintegrasikan sebagai Peserta JKN KIS Jumlah Peserta Penerima		Kota Jambi Telanaipura				Dana Alokasi Umum (DAU)			
1	02	01	1.07	0011				Kota Jambi Telanaipura				Dana Alokasi Umum (DAU)			
1	02	01	1.07	0011				Kota Jambi Telanaipura				Dana Alokasi Umum (DAU)			
1	01	01	1.08			Bantuan luran (PBI) Jaminan Kesehatan (PBI-JK) mendapat kontribusi dari Pemerintah Provinsi		Kota Jambi Telanaipura							
1	02	01	1.08	0001		Persentase Balita Berat Badan Kurang (BB/U) Persentase Kab/Kota dengan cakupan D/S minimal 70% Persentase Kab/Kota dengan		Kota Jambi Telanaipura				Dana Alokasi Umum (DAU)			

1	02	01	1.08	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	600 Orang	Kota Jambi Telanaipura	600 Orang		Dana Alokasi Umum (DAU)		600 Orang	
1	02	01	1.08	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	226 Orang	Kota Jambi Telanaipura	226 Orang		Dana Alokasi Umum (DAU)		226 Orang	
1	02	01	1.08	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	9 Dokumen	Kota Jambi Telanaipura	9 Dokumen		Dana Alokasi Umum (DAU)		9 Dokumen	
1	02	01	1.08	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	Kota Jambi Telanaipura	3 Dokumen		Dana Alokasi Umum (DAU)		3 Dokumen	
1	02	01	1.08	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	Kota Jambi Telanaipura	1 Dokumen		Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	
1	02	01	1.08	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	Kota Jambi Telanaipura	1 Dokumen		Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	
1	02	01	1.08	0004	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	Kota Jambi Telanaipura	2 Dokumen		Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Dokumen	
1	02	01	1.08	0004				Kota Jambi Telanaipura			Dana Alokasi Umum (DAU)			
1	01	01	1.09		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11 Dokumen	Kota Jambi Telanaipura	11 Dokumen				11 Dokumen	

1	02	01	1.09	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	Kota Jambi Telanaipura	1 Dokumen		Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	
1	02	01	1.09	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	Kota Jambi Telanaipura	1 Dokumen		Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	
1	02	01	1.09	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis	145 Orang	Kota Jambi Telanaipura	145 Orang		Dana Alokasi Umum (DAU)		145 Orang	
1	02	01	1.09	0006	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4 Dokumen	Kota Jambi Telanaipura	4 Dokumen		Dana Alokasi Umum (DAU)		4 Dokumen	
1	02	01	1.09	0009	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	Kota Jambi Telanaipura	1 Dokumen		Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	
1	02	01	1.09	0009	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Kota Jambi Telanaipura	5 Dokumen		Dana Alokasi Umum (DAU)		5 Dokumen	
1	02	01	1.09	0010	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	7 Dokumen	Kota Jambi Telanaipura	7 Dokumen		Dana Alokasi Umum (DAU)		7 Dokumen	

1	02	01	1.09	0010	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	11 Unit	Kota Jambi Telanaipura	11 Unit		Dana Alokasi Umum (DAU)		11 Unit
1	02	01	1.09	0011	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12 Dokumen	Kota Jambi Telanaipura	12 Dokumen		Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Dokumen
1	01	01	1.10		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	Kota Jambi Telanaipura	1 Paket		Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Paket
1	02	01	1.10	0011	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			Kota Jambi Telanaipura			Pendapatan dari BLUD		
1	02	02			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	Kota Jambi Telanaipura	2 Dokumen				2 Dokumen
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			Kota Jambi Telanaipura					
					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti	11 Unit	Kota Jambi Telanaipura	11 Unit				11 Unit

		Perizinannya							
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	38 Unit	Kota Jambi Telanaipura	38 Unit				38 Unit
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	36 Unit	Kota Jambi Telanaipura	36 Unit				36 Unit
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			Kota Jambi Telanaipura					
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase Pemenuhan kebutuhan SDM di Fasyankes sesuai standar	50%	Kota Jambi Telanaipura	50%				50%
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	23097.3 0885 Orang	Kota Jambi Telanaipura	23097 .30885 Orang				23097.3 0885 Orang
	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	273 Orang	Kota Jambi Telanaipura	273 Orang				273 Orang

	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Tenaga Kesehatan yang mendapatkan pelatihan terstandar Akreditasi layanan Pendidikan dan Pelatihan yang memenuhi standar pelatihan Persentase SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	0% 0 Klasifikasi 100 %	Kota Jambi Telanaip ura	0% 0 Klasifikasi 100 %				0% 0 Klasifikasi 100 %	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	11 Dokumen	Kota Jambi Telanaip ura	11 Dokumen				11 Dokumen	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			Kota Jambi Telanaip ura						

	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang memenuhi ketentuan perizinan Persentase pedagang besar farmasi (PBF) yang memenuhi ketentuan perizinan Persentase pedagang besar farmasi (PBF) yang memenuhi ketentuan perizinan	100 % 100 %100 %	Kota Jambi Telanaipura	100 % 100 %100 %				100 % 100 %100 %	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Perizinan	44 Sarana	Kota Jambi Telanaipura	44 Sarana				44 Sarana	
	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)			Kota Jambi Telanaipura						
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	44 Sarana	Kota Jambi Telanaipura	44 Sarana				44 Sarana	

1	02	02	1.01		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				Kota Jambi Telanaip ura											
					Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalian Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	3 Dokumen		Kota Jambi Telanaip ura	3 Dokume n								3 Dokumen		
					Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi				Kota Jambi Telanaip ura											
					Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen		Kota Jambi Telanaip ura	1 Dokume n								1 Dokumen		
1	02	02	1.01	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi				Kota Jambi Telanaip ura										Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kesehatan- Penguatan Sistem Kesehatan	
1	02	02	1.01	0006	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	3 Dokumen		Kota Jambi Telanaip ura	3 Dokume n									Dana Alokasi Umum (DAU)	3 Dokumen

1	02	02	1.01	0007	BALAI PELATIHAN KESEHATAN			Kota Jambi Telanaipura			Dana Alokasi Umum (DAU)		
1	02	02	1.01	0008	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Kota Jambi Telanaipura			Dana Alokasi Umum (DAU)		
1	02	02	1.01	0013	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Kota Jambi Telanaipura			Dana Alokasi Umum (DAU)		
1	02	02	1.01	0020	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Jambi Telanaipura	12 Dokumen		Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Dokumen
1	02	02	1.01	0025	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Kota Jambi Telanaipura			Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi		
1	02	02	1.01	0027	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Jambi Telanaipura	1 Paket		Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi		1 Paket
1	02	02	1.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Jambi Telanaipura	1 Paket				1 Paket
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kota Jambi Telanaipura	3 Paket				3 Paket

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Jambi Telanaipura	12 Laporan				12 Laporan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Kota Jambi Telanaipura						
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Jambi Telanaipura	1 Unit				1 Unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kota Jambi Telanaipura						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Jambi Telanaipura	12 Laporan				12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Jambi Telanaipura	12 Laporan				12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Jambi Telanaipura	12 Laporan				12 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kota Jambi Telanaipura						

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Kota Jambi Telanaipura	3 Unit				3 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Jambi Telanaipura	1 Unit				1 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Jambi Telanaipura	1 Unit				1 Unit	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			Kota Jambi Telanaipura						
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			Kota Jambi Telanaipura						
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	900 Orang	Kota Jambi Telanaipura	900 Orang				900 Orang	
	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH			Kota Jambi Telanaipura						

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Kota Jambi Telanaipura						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Kota Jambi Telanaipura						
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Jambi Telanaipura	12 Dokumen				12 Dokumen	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Kota Jambi Telanaipura						
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Jambi Telanaipura	1 Paket				1 Paket	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Jambi Telanaipura	1 Paket				1 Paket	
1 02 02 1.02 0001	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Jambi Telanaipura	1 Paket		Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Paket	
1 02 02 1.02 0002	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Jambi Telanaipura	12 Laporan		Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	
1 02 02 1.02 0003	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Kota Jambi Telanaipura			Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK			

								Dinas-BOK Provinsi				
1	02	02	1.02	0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	Kota Jambi Telanaipura	7 Unit		Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Unit
1	02	02	1.02	0005	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kota Jambi Telanaipura			Dana Alokasi Umum (DAU)	
1	02	02	1.02	0006	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Jambi Telanaipura	12 Laporan		Dana Alokasi Umum (DAU)	12 Laporan
1	02	02	1.02	0007	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Jambi Telanaipura	12 Laporan		Dana Alokasi Umum (DAU)	12 Laporan
1	02	02	1.02	0008	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kota Jambi Telanaipura			Dana Alokasi Umum (DAU)	
1	02	02	1.02	0009	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kota Jambi Telanaipura	2 Unit		Dana Alokasi Umum (DAU)	2 Unit
1	02	02	1.02	0010	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Jambi Telanaipura	10 Unit		Dana Alokasi Umum (DAU)	10 Unit

1	02	02	1.02	0011	Peningkatan Pelayanan BLUD			Kota Jambi Telanaipura			Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi		
1	02	02	1.02	0012	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	7 Unit Kerja	Kota Jambi Telanaipura	7 Unit Kerja		Dana Alokasi Umum (DAU)		7 Unit Kerja
1	02	02	1.02	0013	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Kota Jambi Telanaipura			Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi		
1	02	02	1.02	0014	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			Kota Jambi Telanaipura			Dana Alokasi Umum (DAU)		
1	02	02	1.02	0016	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	Kota Jambi Telanaipura	1 Unit		Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Unit
1	02	02	1.02	0017	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			Kota Jambi Telanaipura			Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK		

Ranwal Renja Tahun 2026

							Dinas-BOK Provinsi									
1	02	02	1.02	0018	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	Kota Jambi Telanaip ura	1 Unit		Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Unit			
JUMLAH																#REF!

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2026 ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Jambi untuk Tahun 2026.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2026, yang mengacu pada pada Rencana strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2025- 2029. Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya.

Ranwal Renja juga merupakan Penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional selama 1 (satu) Tahun.

Agenda-agenda strategis pembangunan kesehatan harus dijadikan acuan dasar unit kerja terkait dan dijabarkan dalam visi dan misi unit kerjanya, sehingga secara komprehensif rencana strategis ini dapat dijalankan secara bersama-sama. melibatkan seluruh unsur jajaran kesehatan di Provinsi Jambi dalam kerja nyata dalam rangka menjabarkan visi dan misi Gubernur yang merupakan modal yang paling penting, sehingga bukan hanya memiliki visi dan misi yang paling utama tetapi bagaimana visi dan misi itu dituangkan dalam kerja yang nyata untuk membangun Provinsi Jambi.


Rencana Kinerja (Renja) ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat Indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2026 dengan penekanan pada pencapaian sasaran program dan indikator prioritas Nasional dan Daerah yang tertuang dalam Isu Strategis Program Pembangunan bidang Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2026.

Dengan ini diharapkan pelaksanaan kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi untuk mengadakan pelatihan, supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap kab/kota dapat dilaksanakan dengan baik dengan ketersediaan pembiayaan yang cukup sesuai dengan usulan yang disampaikan. Sangat diharapkan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang ada di kab/kota dan secara administrasi keuangan harus efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Demikianlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2026 ini disusun, kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Tentunya Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2026 ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya, bila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap aparatur kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.

Jambi, Januari 2025

KEPALA DINAS, *dk*



dr. MHD, Fery Kusnadi, Sp. OG.
NIP. 197505252002121002